



INTERVENSI AMERIKA SERIKAT DI SURIAH
(UNITED STATE OF AMERICA INTERVENTION IN SYRIA)

SKRIPSI

Oleh:

Andhika Bayu Trimulya

NIM 110910101037

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

1.1-0



INTERVENSI AMERIKA SERIKAT DI SURIAH
(UNITED STATE OF AMERICA INTERVENTION IN SYRIA)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Andhika Bayu Trimulya
NIM 110910101037

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2019

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, yang telah mencurahkan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tidak akan pernah bisa saya balas;
2. Adik saya yang selalu menemani, memberi semangat, dan juga saran terhadap pengerjaan skripsi ini;
3. Intan Ayu Agoestya Rizky yang selalu memberikan motivasi dan dorongan hingga selesainya skripsi ini;
4. Guru-guru saya sejak TK, SD, SMP, SMA sampai dengan Perguruan Tinggi;
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTTO

“A false friend and a shadow attend only while the sun shines”

–Benjamin Franklin (1706-1790)¹



¹ Benjamin Franklin (1992). *Poor Richard's Almanack* (hal. 258). New York: Barnes and Noble Books

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andhika Bayu Trimulya.

NIM : 110910101037

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“INTERVENSI AMERIKA SERIKAT DI SURIAH”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2019
Yang menyatakan,

Andhika Bayu Trimulya
NIM 110910101037

SKRIPSI

INTERVENSI AMERIKA SERIKAT DI SURIAH

(UNITED STATE OF AMERICA INTERVENTION IN SYRIA)

Oleh

Andhika Bayu Trimulya
NIM 110910101037

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Fuat Albayumi, S.IP, MA

Dosen Pembimbing Anggota : Dra. Sri Yuniati, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Intervensi Amerika Serikat di Suriah” telah diuji dan disahkan pada;

hari, tanggal : Kamis, 3 Januari 2019

waktu : 09.00 WIB

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji;
Ketua

Drs. Supriyadi, M.Si.
NIP 195803171985031003

Sekretaris I

Sekretaris II

Fuat Albayumi, S.IP., MA
NIP 197404242005011002

Anggota I

Dra. Sri Yuniati, M.Si.
NIP 196305261989022001

Anggota II

Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si.
NIP 196105151988021001

Adhiningasih Prabhawati, S.Sos., M.Si.
NIP 197812242008122001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si.
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

INTERVENSI AMERIKA SERIKAT DI SURIAH; Andhika Bayu Trimulya; 110910101037; 2018; 62 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Amerika Serikat memiliki keinginan yang kuat untuk menjatuhkan Rezim Bashar al-Assad yang selama ini menjadi penghalang bagi kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Sejak serangan Amerika Serikat ke Iraq pada tahun 2003 hubungan antara Amerika Serikat dan Suriah memburuk dan mencapai puncaknya saat terjadi pembunuhan terhadap mantan perdana menteri Lebanon Rafic Hariri yang berujung pada pemutusan hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Suriah. Konflik Suriah yang terjadi pada tahun 2011 adalah sebuah kesempatan bagi Amerika untuk menjatuhkan Bashar al-Assad, namun Amerika tidak bisa melakukan Invasi ke Suriah.

Intervensi terutama dalam bentuk invasi diatur dengan sangat ketat dalam hukum internasional, G.J Starke (1972: 137) memberikan beberapa contoh kasus dimana sebuah negara diberikan hak untuk melakukan intervensi terhadap negara lain, yaitu;

1. Sebagai bagian dari intervensi bersama sesuai dengan piagam PBB
2. Untuk melindungi hak dan kepentingan warga negaranya di luar negeri
3. Untuk membela diri. Dilakukan bila intervensi dibutuhkan untuk menghindari kemungkinan serangan bersenjata
4. Untuk menyelesaikan permasalahan di dalam wilayah protektoratnya
5. Terhadap sebuah negara melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, seperti melakukan intervensi tanpa dasar hukum.

Selain dari pengecualian di atas sebuah negara tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap negara lain. Konflik yang terjadi di Suriah adalah konflik internal dan tidak memenuhi pengecualian yang memberikan hak untuk melakukan invasi ke Suriah. Alasan lain yang membuat Amerika Serikat tidak bisa

melakukan invasi terhadap Suriah adalah hubungan antara Suriah dan Rusia. Rusia adalah salah satu anggota dewan keamanan PBB dan juga merupakan salah satu dari sedikit negara yang memiliki kemampuan militer setara dengan Amerika Serikat. Amerika tidak bisa melakukan invasi terhadap sekutu Rusia dan memberi Rusia alasan untuk melakukan perang terbuka dengan Amerika Serikat. Resiko perang terbuka antara Amerika Serikat dan Rusia bukanlah resiko yang bisa ditanggung oleh Amerika.

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk meneliti tentang intervensi Amerika Serikat. Data dikumpulkan dengan cara studi pustaka (library research) untuk memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara deskriptive kualitative.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat memutuskan untuk menggunakan Strategi Unconventional Warfare. Strategi Unconventional Warfare yang digunakan Amerika di Suriah disesuaikan dengan kondisi konflik di Suriah sehingga memiliki perbedaan dengan Manual Unconventional Warfare Amerika Serikat dalam hal tahapan pelaksanaan, namun secara fundamental strategi yang digunakan Amerika Serikat di Suriah masih mengikuti Manual Unconventional Warfare Amerika Serikat.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Intervensi Amerika Serikat di Suriah”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Fuat Albayumi, S.IP, MA., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dra. Sri Yuniati, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Pimpinan dan staf perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Teman-teman di Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember angkatan 2011 yang telah menjadi teman untuk berbagi dan berdiskusi dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hubungan internasional.

Jember, 3 Januari 2019
Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	xvi
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
1.2.1. Batasan Materi	5
1.2.2. Batasan Waktu	5
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Landasan Konseptual	6
1.5.1. Konsep Intervensi	7
1.5.2. Konsep <i>Unconventional Warfare</i>	8
1.6. Argumen Utama.....	12
1.7. Metode Penelitian.....	12
1.7.1. Metode Pengumpulan Data.....	12
1.7.2. Metode Analisis Data.....	13
1.8. Sistematika Penulisan.....	14
BAB 2. AKTOR DALAM KONFLIK SURIAH	16
2.1. Pemerintah Suriah	17

2.1.1. Angkatan bersenjata Suriah	17
2.1.2. National Defense Force (NDF)	19
2.2. Pihak Oposisi Suriah	20
2.2.1. <i>Syrian National Coalition</i> (SNC)	20
2.2.2. <i>Free Syrian Army</i> (FSA)	20
2.2.3. <i>Syrian Revolution General Commision</i> (SRGC)	21
2.3. <i>Democratic Federation of Northern Syria</i> (DFNS).....	22
2.3.1. <i>Syrian Democratic Council</i>	Error! Bookmark not defined.
2.3.2. <i>Syrian Democratic Forces</i>	Error! Bookmark not defined.
2.4. Gerakan Teroris.....	24
2.4.1. <i>Islamic State Iraq and Levant</i> (ISIL)	24
2.4.2. <i>Al-Nusra</i>	25
2.5. Negara Asing	25
2.5.1. Dukungan Pro-Pemerintah.....	25
2.5.2. Dukungan Pro-Oposisi.....	27
BAB 3. UNCONVENTIONAL WARFARE SEBAGAI STRATEGI UNTUK MEMBELA KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT	28
3.1. <i>Sejarah U.S Unconventional Warfare</i>	29
3.2. <i>Peranan Unconventional Warfare dalam Strategi Nasional Amerika Serikat.....</i>	32
3.3. <i>Metode Amerika Serikat dalam melakukan Unconventional Warfare</i>	34
3.3.1. Penilaian kelayakan pemberian bantuan.....	34
3.3.2. Elemen <i>Unconventional Warfare</i>	35
3.3.3. Tujuh Fase <i>Unconventional Warfare</i>	36
3.3.4. Skenario Perang Umum	37
3.3.5. Skenario Perang Terbatas	39
BAB 4. PENGGUNAAN STRATEGI UNCONVENTIONAL WARFARE DALAM INTERVENSI AMERIKA SERIKAT DI SURIAH.....	41
4.1. <i>Tahapan Unconventional Warfare dalam Konflik Suriah</i>	42
4.1.1. Fase Persiapan.....	42

4.1.2. Fase kontak awal.....	42
4.1.3. Fase penyusupan	43
4.1.4. Fase Organisasi, Pembangunan, dan Pergerakan.....	44
4.2. Taktik Unconventional Warfare yang digunakan di Suriah	45
4.2.1. Gerakan Perlawanan	45
4.2.2. Pemberontakan.....	46
4.2.3. Perang Gerilya	46
4.2.4. Tindakan subversif.....	47
4.3. Keberhasilan Pemberontak yang didukung Amerika Serikat	47
4.3.1. Pertempuran Zabadani	47
4.3.2. Pertempuran Douma	48
4.3.3. Daerah yang dikontrol FSA	48
BAB 5. KESIMPULAN	50
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1 : struktur dari gerakan perlawanan dan pemberontakan	11



DAFTAR SINGKATAN

BBC	<i>British Broadcasting Corporation</i> (Perusahaan Penyiaran Inggris)
CA	Civil Affair (Hubungan Sipil)
CIA	<i>Central Intelligence Agency</i> (Badan Intelijen Pusat)
CNN	<i>Cable News Network</i> (Kantor berita Amerika Serikat)
CP	<i>Counter Proliferation</i> (Pencegahan Penyebaran Senjata)
CT	<i>Counter Terrorism</i> (Pencegahan Aksi Terorisme)
DA	<i>Direct Action</i> (Tindakan Langsung)
DOD	<i>Departement of Defense</i> (Departemen Pertahanan)
FID	<i>Foreign Internal Defense</i> (Pengamanan Internal Negara Lain)
FSA	<i>Free Syrian Army</i> (Pasukan Pembebasan Suriah)
HAM	Hak Asasi Manusia
HN	<i>Hostile Nation</i> (Negara Musuh)
IO	<i>Information Operation</i> (Operasi Informasi)
ISIL	<i>Islamic State of Iraq and Levant</i> (Negara Islam Iraq dan Levant)
MISO	<i>Military Information Support Operation</i> (Operasi Dukungan Informasi Militer)



NGO	<i>Non Governmental Organization</i> (Organisasi Swasta)
OSS	<i>Office of Strategic Service</i> (Kantor Pelayanan Strategis)
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
PD	Perang Dunia
PsyOps	<i>Psychological Operations</i> (Operasi Psikologis)
SCD	<i>Syrian Civil Defense</i> (Pertahanan Sipil Suriah)
SF	<i>Special Forces</i> (Pasukan Khusus)
SFG	<i>Special Force Group</i> (Kelompok Pasukan Khusus)
SR	<i>Special Reconnaissance</i> (Pengintaian Khusus)
USG	<i>United States Government</i> (Pemerintah Amerika Serikat)
USSOCOM	<i>United States Special Operation Command</i> (Komando Operasi Khusus Amerika Serikat)

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pada awal tahun 2011, unjuk rasa dan demonstrasi mulai terjadi di wilayah Suriah, penyebabnya adalah keputusan pemerintah Suriah untuk menerima gelombang pengungsi yang berjumlah lebih dari 1,5 juta jiwa dari Iraq dan bencana kekeringan yang melanda Suriah sejak tahun 2006 (Fountain, 2015). Unjuk rasa dan demonstrasi yang terjadi di negara-negara Arab pada saat itu juga dianggap memberi pengaruh yang signifikan terhadap gelombang demonstrasi yang melanda Suriah (NBC, 2011).

Setelah lengsernya Hosni Mubarak sebagai penguasa Mesir pada tanggal 11 Februari 2011, grafiti (coretan dinding) yang berisikan pesan menuntut turunnya Bashar al-Assad mulai bermunculan di Suriah (al-khouy, 2011), hingga pada tanggal 6 Maret 2011, demonstrasi terjadi di wilayah Daraa menuntut pembebasan 15 remaja yang ditangkap dengan tuduhan menuliskan grafiti berisikan pesan anti pemerintah. Demonstrasi terus meluas hingga pada tanggal 15 Maret 2011 demonstrasi besar terjadi di kota Damaskus dan Aleppo yang berujung dengan ditahannya beberapa orang demonstran (BBC, 2011).

Pada tanggal 18 Maret 2011 di wilayah Daraa demonstrasi besar berujung dengan kerusuhan yang mengakibatkan tewasnya 4 orang pengunjuk rasa. Unjuk rasa terus meluas di berbagai wilayah di Suriah. Pemerintah merespon dengan melakukan penangkapan dan tindakan represif menggunakan kekerasan. Pada tanggal 20 Maret 2011, massa membakar kantor pusat Partai Ba'ath dan beberapa bangunan lain di kota Daraa, hal ini berujung pada bentrokan antara petugas keamanan dan demonstran yang mengakibatkan 7 anggota kepolisian dan 15 demonstran tewas (Kahn, 2011). Tindakan represif pemerintah awalnya tidak menyurutkan aksi demonstrasi yang terjadi di Daraa, namun tindakan represif pemerintah yang semakin brutal berhasil memadamkan unjuk rasa di Daraa. Saat operasi berakhir korban jiwa mencapai puluhan orang dan ratusan demonstran ditangkap oleh pasukan pemerintah (Holliday, 2011: 13).

Tindakan brutal tentara pemerintah di Daraa ternyata tidak menyurutkan aksi demonstrasi di wilayah lain. Aksi demonstrasi dan kekerasan kembali terjadi di wilayah Homs dan Hama. Pemerintah melakukan strategi yang sama seperti yang mereka gunakan di Daraa, namun hal ini justru menyulut perlawanan bersenjata di wilayah tersebut (Holliday, 2011: 13). Fase awal pemberontakan yang mengawali Perang Saudara di Suriah terjadi antara bulan Juli 2011 hingga bulan April 2012, pada fase ini perlawanan bersenjata dari warga sipil dan anggota militer yang membelot mulai terbentuk, hal ini terutama ditandai oleh pembentukan *Free Syrian Army* (FSA), pasukan oposisi terorganisir pertama yang terbentuk dari anggota militer Suriah yang membelot. Hal ini mengubah status konflik Suriah menjadi Perang Saudara (Kennedy, et al., 2011).

Pada bulan Maret 2012 diketahui bahwa pemerintah Amerika Serikat telah mempekerjakan mantan anggota dari organisasi tentara bayaran Black Water Jamie F. Smith, untuk menyediakan informasi tentang Suriah beserta kekuatan pihak oposisi dengan tujuan memperhitungkan apakah Amerika Serikat dapat membantu perubahan rezim di Suriah (Kelley, 2012). Informasi ini bocor setelah server email dari Stratfor yaitu sebuah perusahaan penerbit intelijen Amerika Serikat berhasil diretas oleh *hacker* kolektif *anonymous* dan email mengenai informasi yang diminta oleh Smith disebar oleh *Wikileaks* (al-akhbar, 2012).

Pada tanggal 11 September 2012, dokumen yang ditemukan dalam puing-puing kedutaan besar Amerika Serikat di Benghazi, Libya, yang hancur diakibatkan serangan militant Muslim, menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah menyalurkan senjata dari Libya terhadap pasukan oposisi di Suriah melalui wilayah Turki. Operasi ini dilakukan secara rahasia oleh fasilitas CIA di Benghazi dengan persetujuan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan merupakan bagian operasi Timber Sycamore. Operasi ini diperkirakan telah berjalan lebih dari satu tahun, dan dimulai beberapa waktu setelah kematian penguasa Libya Muammar Gaddafi (Hersh, 2016).

Pada tahun 2013, sebuah organisasi kemanusiaan bernama *Syrian Civil Defense* berdiri di Suriah, tujuan utama organisasi ini adalah membantu korban dari Perang Saudara di Suriah, organisasi ini kemudian lebih dikenal sebagai *The White*

Helmet karena atribut yang selalu mereka gunakan yaitu helm keamanan berwarna putih. Namun informasi yang muncul menunjukkan bahwa SCD bukan organisasi kemanusiaan Suriah, melainkan organisasi yang dibentuk oleh negara asing dengan merekrut warga Suriah sebagai anggota yang kemudian dilatih oleh seorang konsultan keamanan Inggris bernama James Le Mesurier. (Maydayrescue, 2015) Pelatihan dan kursus disediakan oleh *Arama Kurtarma Derneği* (AKUT) *Search and Rescue Association*, sebuah *Non-Governmental Organization* (NGO) di Turki yang bergerak di bidang penanggulangan bencana, dan *The Consultancy, Research and Knowledge* (ARK) yang juga berbasis di Turki. Operasional SCD mendapatkan pendanaan yang sangat besar dari Amerika Serikat dan sekutunya.

SCD berfokus pada penanggulangan situasi dan pertolongan pertama pada korban konflik di Suriah terutama di daerah yang dikuasai oleh pihak oposisi yang sulit untuk dijangkau oleh organisasi kemanusiaan lain. Kemampuan memberikan bantuan di daerah yang tidak bisa dijangkau oleh organisasi lain membuat SCD menjadi satu-satunya penyedia informasi dari daerah-daerah tersebut. SCD secara rutin mengunggah video kegiatan mereka melakukan pertolongan dan melakukan usaha diplomatik untuk menghentikan konflik yang terjadi di Suriah, namun informasi yang diberikan SCD cenderung mendiskreditkan Pemerintah Suriah dan usaha diplomasi yang dilakukan juga melemahkan posisi Pemerintah Suriah (European Parliament, 2016).

Pada tahun 2013, Amerika Serikat mendapatkan informasi bahwa beberapa daerah di Suriah merupakan basis dari organisasi teror *Islamic State of Iraq and the Levant* (ISIL), hal ini menjadi dasar pasukan Amerika Serikat dan sekutunya memasuki wilayah Suriah dengan merujuk pada kebijakan *War on Terror* (Jackson, 2017) dengan tujuan untuk menghancurkan organisasi tersebut. Terlebih lagi hubungan buruk antara Amerika Serikat beserta sekutunya dengan Pemerintah Suriah membuat mereka masuk tanpa seizin pemerintah dan memberikan bantuan terhadap pemberontak “moderat” dalam usahanya menghancurkan ISIL (Black, 2015).

Amerika Serikat dan sekutunya, mulai secara terbuka memberikan bantuan persenjataan dan pendanaan kepada kelompok pemberontak “moderat” yang

mewakili kepentingan mereka dalam konflik di Suriah (Hersh, 2016), bantuan yang mereka berikan berupa peralatan militer, pendanaan, dan pelatihan terhadap anggota pemberontak serta serangan udara terhadap kelompok ISIL (CJTF–OIR News Release, 2015).

Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan strategi perang tidak konvensional atau *Unconventional Warfare* yang telah di revisi, sebuah strategi dimana mereka memberikan bantuan terhadap pemberontak bukan hanya dalam hal logistik namun juga pelatihan dalam peningkatan konflik, agitasi, penggiringan opini, dan propaganda yang memanfaatkan kapabilitas Amerika Serikat secara penuh, untuk memperkuat pihak oposisi dan melemahkan pemerintah yang berkuasa. Strategi ini juga memaksimalkan penggunaan media massa dan pemberitaan oleh *Non-Governmental Organization* (NGO) untuk mendesak pemerintah. Hal ini terlihat pada pemberitaan beberapa NGO yang seharusnya memiliki netralitas dalam konflik namun tampak tidak proporsional dalam menerbitkan pemberitaan yang membuat salah satu pihak terlihat lebih buruk di mata internasional (Beeley, 2015).

Kantor-kantor berita barat seperti The Guardian, New York Times, CNN dan BBC menjadi saluran propaganda yang efektif dengan berita yang memberikan gambaran buruk tentang pemerintahan Bashar al-Assad, didukung oleh informasi organisasi kemanusiaan yang disajikan dengan perspektif yang berpihak membuat pemerintahan Bashar al-Assad terkesan sebagai pihak yang jahat (Shaheen, 2016). Walaupun sebenarnya informasi tersebut bersifat netral (Russian Today, 2016). Kemajuan teknologi yang membuat informasi semakin mudah dibagikan membuat berita-berita ini dengan cepat menyebar dan mempengaruhi pemikiran pembacanya (Kinzer, 2016). Hal ini merupakan modifikasi dari strategi *Unconventional Warfare* Amerika Serikat sebelumnya yang lebih terpusat pada *support* terhadap element pemberontak dan penggiringan opini rakyat di negara yang mengalami konflik. Strategi ini sekarang mencakup propaganda global yang melibatkan dunia internasional untuk mendukung tindakan AS.

Hal-hal diatas menjadi alasan penulis ingin mengangkat judul: **“INTERVENSI AMERIKA SERIKAT DI SURIAH”**.

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Analisis pada studi hubungan internasional memerlukan adanya suatu batasan ruang lingkup yang jelas. Batasan ruang lingkup pembahasan berisi hal-hal yang ingin penulis angkat dalam tulisannya. Tujuan dibuatnya ruang lingkup pembahasan ialah untuk memudahkan penulis dalam membuat analisisnya agar lebih fokus pada pokok permasalahan. Batasan yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1. Batasan Materi

Batasan materi berguna untuk menunjukkan ruang pembahasan sebuah peristiwa atau objek yang akan dianalisis, yaitu cakupan kawasan atau objek studinya. Penulis membatasi permasalahan penelitiannya pada intervensi Amerika Serikat dan sekutunya yang meliputi dukungan terhadap oposisi pemerintah, bantuan logistik dan persenjataan, penggunaan kantor berita Barat dan NGO sebagai alat penyebaran informasi untuk melemahkan dukungan terhadap pemerintah yang berdaulat dan menggiring opini dunia untuk mendukung tindakan AS.

1.2.2. Batasan Waktu

Batasan waktu diperlukan untuk mengkaji rentang waktu yang dikaji penulis dalam karya ilmiahnya. Rentang waktu pada karya ilmiah ini dimulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Penulis memilih tahun 2011 karena pada tahun inilah gelombang unjuk rasa mulai terjadi di Suriah dan menyulut konflik yang memberikan kesempatan bagi pihak asing untuk melakukan intervensi dengan memberikan bantuan pada pihak oposisi dan menanamkan NGO yang memberikan pemberitaan negatif tentang pemerintah Suriah di mata rakyat dan dunia. Tahun 2017 dipilih sebagai batas akhir dikarenakan pada akhir tahun tersebut pemerintah Amerika Serikat tidak lagi menjadikan pergantian rezim di Suriah sebagai prioritas dan lebih berfokus pada perlawanan terhadap ISIL (Nichols, 2017).

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan serangkaian pertanyaan yang dijadikan dasar pijakan bagi peneliti untuk menentukan berbagai desain dan strategi penelitian. Permasalahan penelitian muncul karena adanya kesenjangan antara fakta empiris dengan harapan yang diinginkan. Selanjutnya, dari rumusan masalah akan dapat diketahui tujuan yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Selain itu, dapat juga diturunkan menjadi argumen utama, juga metodologi penelitian serta teknik mengumpulkan dan menganalisis data.

Amerika Serikat memberikan bantuan persenjataan terhadap pihak Oposisi di Suriah dan memberi pendanaan terhadap NGO yang memberikan informasi yang menyudutkan pemerintah Suriah. Selain itu sejak tahun 2006 Amerika Serikat telah mendanai oposisi dari pemerintah Suriah di luar negeri. Hal ini menunjukkan sebuah tindakan terkoordinasi yang bertujuan untuk melemahkan kekuatan pemerintah yang berdaulat. Penulis mencoba menganalisis tindakan Amerika Serikat melalui rumusan masalah **“Bagaimana Strategi Intervensi Amerika Serikat dalam konflik Suriah?”**

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui strategi Amerika Serikat dalam intervensi di Suriah serta membuktikan penggunaan Strategi *Unconventional Warfare* Amerika Serikat di Suriah.

1.5. Landasan Konseptual

Dalam penulisan karya ilmiah ini digunakan konsep yang dapat membantu untuk menjelaskan dan menganalisa permasalahan. Pemilihan dari konsep dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Menurut Mohtar Mas' oed konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek atau suatu fenomena tertentu. Konsep adalah sebuah gagasan, bukan sesuatu yang asing digunakan dalam keseharian, yang digunakan untuk menyederhanakan kenyataan

yang ada dengan mengkategorikan hal-hal yang ditemui dengan ciri yang relevan dengan kita (Mas'ood, 1990: 219).

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis akan menggunakan konsep yang dianggap relevan terhadap permasalahan. Untuk menjelaskan bentuk intervensi Amerika Serikat di Suriah serta strategi *Unconventional Warfare* yang dipilih oleh Amerika Serikat, penulis menggunakan konsep yang dinilai paling tepat untuk dapat menjawab rumusan masalah, yakni konsep intervensi dan konsep *Unconventional Warfare* yang digunakan oleh *Departement of the Army* Amerika Serikat.

1.5.1. Konsep Intervensi

Hukum internasional pada umumnya melarang adanya campur tangan suatu negara terhadap negara lain, yang dalam hal ini berarti suatu tindakan yang lebih dari campur tangan biasa dan lebih kuat dari mediasi atau usulan politik. Larangan ini umumnya berkaitan dengan kepentingan negara yang terkait. J.G. Stark (1972: 136) membagi kategori intervensi menjadi tiga yaitu;

1. Intervensi internal. Intervensi dimana sebuah negara ikut campur dalam masalah internal negara lain dengan mendukung salah satu pihak yang bertikai
2. Intervensi eksternal. Intervensi dimana sebuah negara ikut campur dalam suatu hubungan antar dua negara dengan memihak salah satu pihak.
3. Intervensi hukuman. Intervensi yang dilakukan dengan cara memberi sanksi atau blokade (tanpa perang) terhadap negara yang melanggar traktat internasional
4. Intervensi subversif. Intervensi yang dilakukan dengan aktivitas propaganda atau aktivitas lainnya yang dilakukan suatu negara dengan maksud untuk menyulut revolusi atau perang saudara di negara lain, demi kepentingan negara yang mengintervensi. Intervensi subversif dilarang oleh hukum internasional (Starke, 1972: 136).

Tulisan ini akan menggunakan konsep intervensi internal dan konsep intervensi subversif untuk menjelaskan tindakan dan upaya campur tangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Suriah.

1.5.2. Konsep Unconventional Warfare

Strategi *Unconventional Warfare* dirancang untuk memanfaatkan gerakan perlawanan atau pemberontak yang telah ada di dalam sebuah negara untuk menjatuhkan pemerintah atau penguasa di negara tersebut tanpa campur tangan yang besar dari negara sponsor, dengan menggunakan tenaga gerakan perlawanan dan pemberontak negara sponsor dapat mencapai tujuannya tanpa mengundang perhatian internasional terhadap dirinya (Department of the Army, 2010: 1-8).

Pemimpin dari *United State Special Operation Command* (USSOCOM), mendefinisikan *Unconventional Warfare* sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan untuk memungkinkan kelompok perlawanan atau pemberontak untuk memaksa, mengganggu, atau menggulingkan pemerintah atau pihak yang berkuasa dengan bekerja sama dengan kelompok bawah tanah atau gerilyawan, memberikan *support* dan bantuan terhadap kelompok pemberontak tersebut, atau melakukan tindakan tersebut sendiri (Department of the Army, 2010: 1-1)

Tujuan dari *Unconventional Warfare* adalah mengeksploitasi kelemahan *Hostile Power atau Host Nation* (HN) (Merriam Webster) dalam hal politik, militer, ekonomi dan psikologi dengan mengembangkan dan mempertahankan kelompok pemberontak untuk menjalankan tujuan yang diinginkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sebelumnya, *Unconventional Warfare* digunakan untuk memberikan dukungan pada pemberontak dalam skenario dimana perang telah terjadi, namun setelah berakhirnya Perang Dunia II militer Amerika Serikat semakin membutuhkan penggunaan *Unconventional Warfare* dalam konflik yang mereka atasi (Department of the Army, 2010: 1-1).

Pemberian bantuan dalam operasi *Unconventional Warfare* dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu:

1. Bantuan tidak langsung : dalam perang terbatas, bantuan Amerika Serikat kadang tidak diinginkan. Dalam kasus ini Amerika Serikat dapat memberikan bantuan melalui negara ketiga atau melalui koalisi, dalam perang terbatas, bantuan yang dapat diberikan sangat terbatas dan biasanya dibatasi dalam bentuk bantuan logistik dan pelatihan
2. Bantuan langsung : diberikan dalam kondisi perang yang umum dimana keberadaan dukungan Amerika Serikat tidak akan terlalu dipermasalahkan, sehingga bentuk bantuan juga dapat diperluas dalam bentuk logistik, pelatihan, serta memberikan masukan mengenai daerah aman serta area yang dikuasai musuh (tidak berkaitan dengan pertempuran)
3. Bantuan tempur : meliputi segala bantuan yang masuk dalam bantuan langsung dan bantuan tidak langsung ditambah dengan bantuan tempur (Department of the Army, 2010: 1-3)

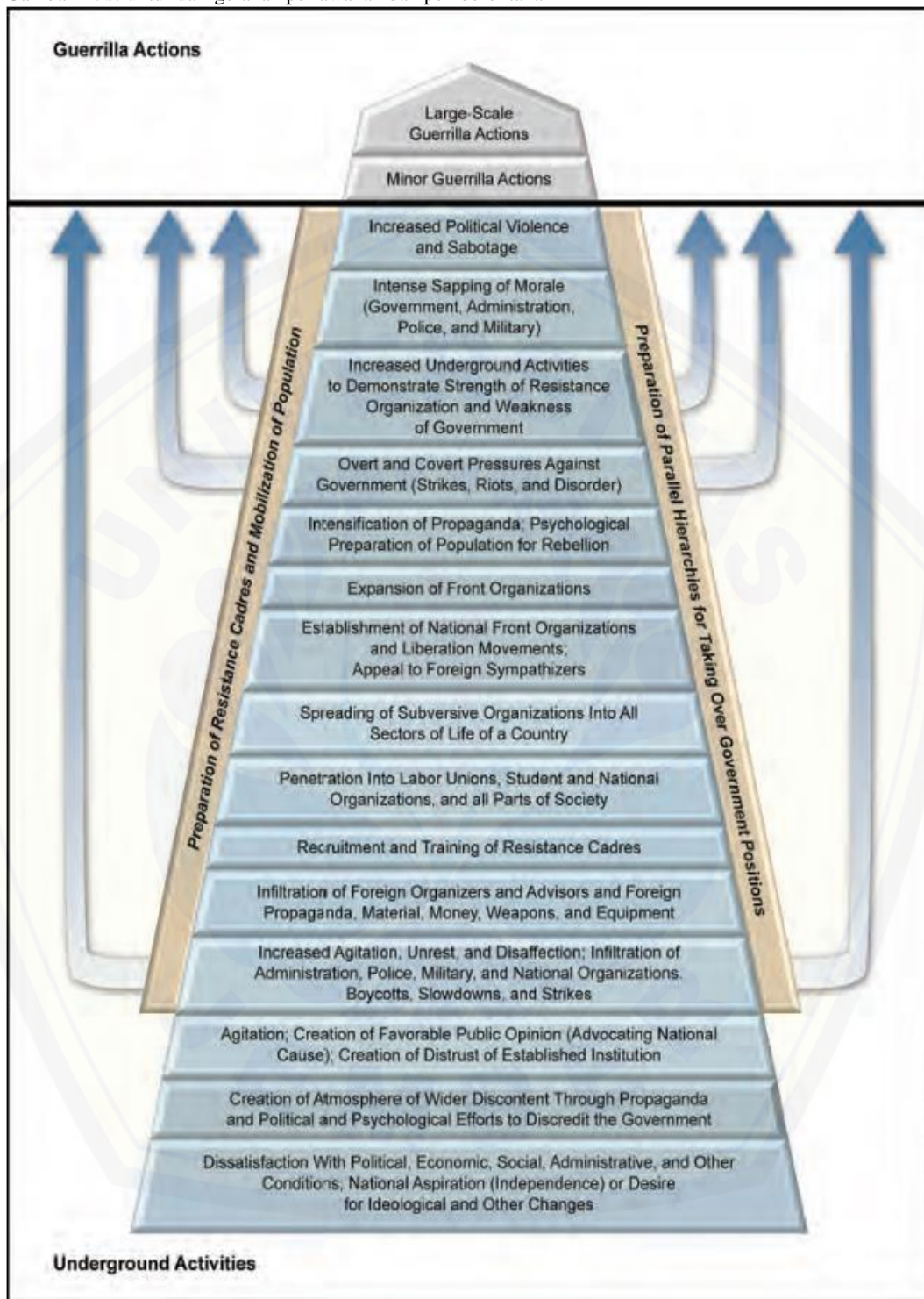
Terdapat 7 tahap dalam aplikasi *Unconventional Warfare* di sebuah negara yang berfungsi untuk menjamin agar operasi yang dijalankan berjalan dengan lancar, 7 tahapan ini adalah;

1. Persiapan : mempersiapkan populasi untuk bersatu melawan pemerintah, serta mempersiapkan populasi untuk mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat
2. Kontak awal : pemerintah Amerika Serikat melakukan kontak dengan pimpinan kelompok pemberontak
3. Penyusupan : anggota pasukan khusus atau *Special Force* (SF) memasuki daerah operasi, membuat sambungan komunikasi dengan markas pusat dan pasukan pemberontak
4. Pengorganisasian : SF mengorganisasi, melatih, dan memperlengkapi anggota pemberontak

5. **Pembangunan** : anggota SF membantu anggota pemberontak terlatih dalam operasi yang dibatasi untuk membangun kelompok pemberontak yang efektif
6. **Pelaksanaan** : operasi dilakukan hingga perang berakhir atau anggota militer konvensional diturunkan oleh AS
7. **Transisi** : anggota *Unconventional Warfare* melakukan proses transisi terhadap kontrol nasional atau kembali ke militer konvensional (Department of the Army, 2010: 19)

Secara umum anggota *Unconventional Warfare* mempersiapkan pemberontak untuk membangun dan mempersiapkan diri dari setiap tahap pemberontakan dari penyebaran ketidakpuasan terhadap pemerintah, agitasi, hingga tindakan gerilya skala besar yang berujung pada perang sipil (Department of the Army, 2010: 2-4).

Gambar 1 : struktur dari gerakan perlawanan dan pemberontakan



Sumber : Department of the Army. 2010. Special Forces Unconventional Warfare. Washington : Department of the Army. Hal. 2-4

Gambar diatas menunjukkan sistem operasi Unconventional Warfare yang bisa dibedakan menjadi dua tahap yaitu aktivitas bawah tanah (*underground activity*) dan aksi gerilya (*guerilla actions*). Sebagian besar waktu dihabiskan untuk mempersiapkan kader pemberontak dan memobilisasi rakyat sebelum aksi gerilya dilakukan. Strategi yang digunakan berupa penyusupan terhadap instansi pemerintah dan organisasi masyarakat, propaganda dan agitasi secara terus menerus, dan penguatan organisasi ujung tombak hingga kekuatan melemah dan memungkinkan aksi gerilya dilakukan dengan lebih mudah.

1.6.Argumen Utama

Berdasarkan pada penjabaran di atas, penulis ingin menggunakan konsep dan teori yang telah dijelaskan untuk mengajukan argumentasi bahwa:

Intervensi Amerika Serikat di Suriah dilakukan menggunakan strategi *Unconventional Warfare* yang dirancang untuk memberikan dukungan berupa pendanaan, pelatihan, dan persenjataan terhadap pemberontak dan melemahkan pemerintah melalui tindakan *subversif* baik secara lokal maupun internasional tanpa terlibat langsung dalam konflik.

1.7.Metode Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah diperlukan adanya metode yang jelas untuk membantu menganalisa dan menjawab suatu permasalahan. Metode merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk mengungkap hubungan antar konsep dengan data-data. Dalam hal ini, metode penelitian yang akan digunakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1.7.1. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan fondasi dalam penelitian (Yin, 2011: 129). Data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah dapat diperoleh dengan metode-metode tertentu. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*,

sumber, dan cara (Sugiyono, 2008: 225). Bila dilihat dari *setting*-nya, data pada penelitian ini dikumpulkan pada seting alamiah (*natural setting*) yaitu tidak melalui metode eksperimen. Jika dilihat dari sumber data, dapat dibedakan menjadi sumber data primer dan sekunder, dimana sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pada penelitian ini, sumber data yang diperoleh yaitu data sekunder, karena teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau melakukan observasi secara tidak langsung. Tempat pengumpulan data adalah:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Ruang Baca FISIP Universitas Jember

Sumber literatur adalah:

1. Buku
2. Jurnal dan artikel
3. Media internet

1.7.2. Metode Analisis Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif merupakan cara untuk mengkaji permasalahan dengan penggambaran untuk memahami perilaku objek yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif. Pada metode kualitatif ini data yang dianalisa hanya bersifat menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan suatu fenomena secara riil dan apa adanya, sedangkan pada penelitian kualitatif objek yang akan diteliti bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti akan meneliti keseluruhan situasi sosial yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2008: 207). Pada karya ilmiah ini yang diteliti berupa

aktivitas dari pemerintah Amerika Serikat dan tindakan yang diambil terkait dengan Suriah. Penulis juga menggunakan cara berpikir deduktif untuk mencari kesimpulan perilaku dari aktor yang diteliti.

1.8.Sistematika Penulisan

Dalam usaha mempermudah penulisan karya ilmiah ini, penulis akan membaginya ke dalam lima bab dimana pada setiap bab akan terdiri dari sub bab yang saling berhubungan. Sistematika penulisan dari bab-bab tersebut sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar pemikiran, argument utama, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2. Aktor Dalam konflik Suriah

Bab ini akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Suriah, pihak yang didukung, serta dukungan yang diberikan.

Bab 3. *Unconventional Warfare* sebagai strategi untuk membela Kepentingan Nasional Amerika Serikat

Bab ini menjelaskan apa itu *Unconventional Warfare*, bagaimana strategi *Unconventional Warfare* dilakukan, sejarah penggunaan strategi *Unconventional Warfare*, dan perubahan yang terjadi pada strategi tersebut dari awal diadopsinya hingga era modern saat ini.

Bab 4. Penggunaan Strategi *Unconventional Warfare* dalam Intervensi Amerika Serikat di Suriah

Bab ini memberikan penjelasan mengenai intervensi Amerika Serikat di Suriah serta menjabarkan penggunaan *Unconventional Warfare* oleh Amerika

Serikat pada konflik Suriah untuk mendukung pemberontak dan melemahkan rezim yang berkuasa.

Bab 5. Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan sebagai penutup dari keseluruhan ilmiah ini yang menjawab permasalahan yang diangkat.



BAB 2. AKTOR DALAM KONFLIK SURIAH

Konflik yang terjadi di Suriah adalah konflik bersenjata multi-sisi yang melibatkan Pemerintah Ba'athist Republik Arab Suriah yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad dan kelompok oposisi pemerintah Suriah. Kedua belah pihak mendapatkan dukungan dari kelompok militan domestik yang terbentuk setelah konflik dan dukungan dari Negara asing. Konflik berawal dari ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Bashar al-Assad. Ketidakpuasan ini memunculkan serangkaian unjuk rasa dan demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah. Unjuk rasa dan demonstrasi meningkat menjadi konflik bersenjata setelah pemerintah menggunakan kekerasan untuk membubarkan demonstrasi dan unjuk rasa yang terjadi.

Perang yang terjadi di Suriah melibatkan banyak kelompok yang memiliki agenda dan tujuan masing-masing. Secara umum kelompok yang bertikai di Suriah dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok yaitu; Pemerintah Suriah yang didukung kelompok militan pro-pemerintah, pihak oposisi yang diwakili oleh *Syrian National Coalition* (SNC) dalam lingkup internasional. SNC mewakili kepentingan berbagai kelompok militan anti-pemerintah termasuk FSA (AFP, 2012) yang merupakan kelompok oposisi militan terbesar dalam konflik Suriah dan *Syrian Revolution General Commision* (SRGC) yang merupakan koalisi dari 40 kelompok oposisi militan dalam konflik Suriah (AFP, 2011). Pada tahun 2015 *Syrian Democratic Council* (SDC) dengan *Syrian Democratic Forces* (SDF) sebagai kekuatan militernya berdiri dengan tujuan pendirian *Democratic Federation of Northern Syria* (DFNS) (Drwish, 2016). Perbedaan mendasar antara DFNS dengan SDC adalah DFNS tidak memiliki niatan untuk mendapatkan kemerdekaan penuh, DFNS menginginkan otonomi dalam Suriah yang federal dan demokratis.

Konflik Suriah juga melibatkan negara asing dan organisasi teroris seperti al-Qaeda dan ISIL yang menginginkan pendirian Negara Islam dengan system kekhalifahan. Seluruh Negara asing yang terlibat dalam konflik di Suriah memiliki tujuan untuk menghancurkan ISIL, namun disamping tujuan tersebut keberpihakan

negara asing tersebut terbagi antara Negara Pro-Pemerintah seperti Rusia, Iran, dan Iraq dengan negara yang mendukung oposisi pemerintah seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Turki, dan anggota Liga Arab.

Berdasarkan kepentingan yang ingin dicapai, pihak yang terlibat dalam konflik Suriah dapat dibedakan menjadi 5 kelompok yang meliputi; Pemerintah Suriah, Kelompok Oposisi Suriah, Pasukan Demokratis Suriah, ISIL, Al-Qaeda (Tahrir al-Sham), serta Negara asing dengan dukungan yang tersebar antara pemerintah Suriah dan berbagai kelompok oposisi Suriah.

2.1.Pemerintah Suriah

Pemerintah Suriah adalah pihak dengan kekuatan, pengaruh dan wilayah kekuasaan terbesar dalam konflik yang terjadi di Suriah, kekuatan tempur pemerintah Suriah meliputi Angkatan Bersenjata Suriah dan Pasukan Pertahanan Nasional Suriah. Pemerintah Suriah mendapatkan dukungan dari kekuatan domestik dan juga sekutu luar negerinya yang meliputi;

2.1.1. Angkatan Bersenjata Suriah

Angkatan Bersenjata Suriah adalah kekuatan militer Republik Arab Suriah yang terdiri dari Tentara Arab Suriah, Angkatan Laut Arab Suriah, Angkatan Udara Arab Suriah, Angkatan Pertahanan Udara Arab Suriah, dan beberapa pasukan paramiliter, National Defense Force (NDF). Menurut konstitusi Suriah, Presiden Suriah adalah Panglima Angkatan Bersenjata. Sejak Perang saudara di Suriah terjadi, jumlah anggota pasukan militer Suriah telah turun lebih dari setengah dari jumlah sebelum konflik dari 325.000 personil menjadi 150.000 personil pada Desember 2014, dikarenakan desersi, menghindari wajib militer, dan korban tewas dalam perang (SCMP. 2014).

Sejak Perang Sipil Suriah dimulai, Angkatan Bersenjata telah dikirim untuk memerangi pemberontak. Ketika pemberontakan berkembang menjadi perang saudara, banyak pasukan Sunni yang membelot dari Angkatan Bersenjata Suriah dan bergabung dengan FSA (Bakri, 2011).

Tentara Arab Suriah

Syrian Arab Army (SAA) atau Tentara Suriah adalah cabang kekuatan darat dari Angkatan Bersenjata Suriah. SAA merupakan cabang militer dominan dari empat cabang angkatan bersenjata, mengendalikan posisi paling tinggi di angkatan bersenjata, dan memiliki anggota terbesar, yang mencapai sekitar 80 persen dari total angkatan bersenjata. Tentara Suriah berasal dari pasukan militer lokal yang dibentuk oleh Perancis setelah Perang Dunia I, setelah Perancis memperoleh mandat atas wilayah Suriah (Pollack, 2002: 447).

Angkatan Laut Suriah

Pada tahun 1950 Angkatan Laut Suriah didirikan setelah pengadaan beberapa kapal laut dari Perancis. Personil awal terdiri dari tentara yang telah dikirim ke akademi pelatihan angkatan laut Perancis (globalsecurity, 2017). Pada tahun 1985 Angkatan Laut terdiri dari sekitar 4.000 perwira dan 2.500 anggota cadangan. Angkatan laut Suriah berada di bawah komando wilayah militer Latakia. Armada tersebut berbasis di pelabuhan Latakia, Baniya, Minat al Bayda, dan Tartus. Di antara 41 armada kapal adalah dua frigate, 22 kapal serang rudal (termasuk sepuluh kapal rudal Osa II), dua pemburu kapal selam, empat kapal perang ranjau, delapan kapal perang, enam kapal patroli, enam kapal rudal *Corvette*, tiga kapal pendarat, satu kapal pemulihan torpedo dan, sebagai bagian dari sistem pertahanan pesisirnya, rudal anti-kapal berbasis pantai Sepal dengan jangkauan 300 km (Masykur, 2012).

Angkatan Udara Suriah

Angkatan Udara Suriah adalah cabang penerbangan Angkatan Bersenjata Suriah. Angkatan Udara Suriah didirikan pada 1948 dan mengalami pertempuran pada 1948, 1967, 1973, dan pada 1982 melawan Israel. Angkatan Udara Arab telah terlibat pertempuran melawan kelompok-kelompok militan di tanah Suriah 2011-12, selama perang saudara Suriah. Saat ini ada setidaknya 15 pangkalan angkatan udara Suriah di seluruh negara. Pada 2011, sumber-sumber Rusia melaporkan 40.000 personel di Angkatan Udara, sedangkan Reuters melaporkan 100.000.

Menurut *Library of Congress Country Studies* pada tahun 1987, Komando Pertahanan Udara, di dalam Komando Angkatan Darat tetapi juga terdiri dari personel Angkatan Udara, berjumlah sekitar 60.000. Pada tahun 1987 unit termasuk 20 brigade pertahanan udara (dengan sekitar 95 baterai SAM) dan dua resimen pertahanan udara. Komando Pertahanan Udara memiliki akses komando ke pesawat pencegat dan fasilitas radar. Pertahanan udara termasuk baterai SAM jarak jauh SA-5 di sekitar Damaskus dan Aleppo, dengan unit SA-6 dan SA-8 seluler SAM tambahan dikerahkan di sepanjang sisi Suriah perbatasan Lebanon dan di Lebanon timur (Herzog, 1982: 347).

2.1.2. National Defense Force (NDF)

NDF atau Pasukan Pertahanan Nasional Suriah dibentuk dari milisi pro-pemerintah. Mereka menerima gaji dan peralatan militer dari pemerintah dan berjumlah sekitar 100.000 personel (Reuters, 2013). Pasukan bertindak dalam peran infanteri, secara langsung berperang melawan pemberontak di medan perang dan menjalankan operasi kontra-pemberontakan dengan koordinasi dengan angkatan bersenjata, yang memberi mereka dukungan logistik dan artileri. Pasukan ini memiliki resimen wanita berjumlah 500 orang yang disebut "Lionesses of National Defense" yang mengoperasikan pos pemeriksaan (Hefez, 2013). Anggota NDF, seperti tentara reguler, diizinkan untuk menjarah medan perang (tetapi hanya jika mereka

berpartisipasi dalam serangan dengan tentara), dan dapat menjual hasil jarahan untuk uang tambahan.

2.2. Pihak Oposisi Suriah

2.2.1. *Syrian National Coalition* (SNC)

Koalisi Nasional untuk Revolusi Suriah dan Pasukan Oposisi yang disebut Koalisi Nasional Suriah, yang merupakan koalisi kelompok oposisi dalam Perang Sipil Suriah yang didirikan di Doha, Qatar, pada November 2012. Pada pembentukannya pada bulan November 2012, Koalisi Nasional memilih Moaz al-Khatib sebagai presidennya, Riad Seif dan Suheir Atassi sebagai wakil presiden dan Mustafa Sabbagh sebagai sekretaris jenderal. Koalisi ini memiliki dewan sekitar 63 anggota, termasuk 22 anggota dari Dewan Nasional Suriah (Tree, 2012).

2.2.2. *Free Syrian Army* (FSA)

Free Syrian Army atau Tentara Pembebasan Suriah adalah struktur oposisi utama bersenjata yang beroperasi di Suriah yang telah aktif selama perang saudara Suriah (Albayrak, 2011). Tentara Pembebasan Suriah terdiri dari para personel Angkatan Bersenjata Suriah yang membelot dan relawan, pembentukannya diumumkan pada tanggal 29 Juli 2011 dalam sebuah video yang dirilis di internet oleh sekelompok desertir berseragam dari militer Suriah yang dipanggil anggota tentara Suriah untuk membelot dan bergabung dengan mereka (Landis, 2011).

Pemimpin FSA Kolonel Riad al-Asaad pada bulan Agustus 2011 mengumumkan bahwa FSA akan bekerja sama dengan demonstran untuk menurunkan sistem, menyatakan bahwa semua pasukan keamanan menyerang warga sipil menjadi sasaran dibenarkan. FSA dikoordinasikan dengan Dewan Nasional Suriah dimulai pada Desember 2011 dan mendukung Koalisi Nasional untuk Revolusi Suriah dan Pasukan Oposisi setelah pembuatan koalisi pada November 2012 (Sherlock, 2012).

Pada bulan Oktober 2011, Riad al-Asaad juga menyatakan bahwa Tentara Pembebasan Suriah tidak memiliki tujuan politik kecuali untuk melengserkan Bashar Assad sebagai presiden Suriah. FSA beroperasi di seluruh Suriah, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Pasukan aktif di barat laut (Idlib, Aleppo), wilayah tengah (Homs, Hama, dan Rastan), pantai sekitar Latakia, selatan (Daraa dan Houran), timur (Dayr al-Zawr, Abu Kamal), dan daerah Damaskus. Konsentrasi terbesar dari kekuatan ini tampaknya di wilayah tengah (Homs, Hama, dan sekitarnya), dengan sembilan atau lebih batalion aktif di sana (*Bakri, 2011*).

2.2.3. *Syrian Revolution General Commision (SRGC)*

Syrian Revolution General Commision atau Komisi Umum Revolusi Suriah adalah koalisi Suriah dari 40 kelompok oposisi Suriah untuk menyatukan upaya mereka selama perang saudara Suriah yang diumumkan pada tanggal 19 Agustus 2011 di Istanbul, Turki. Komisi Umum Revolusi Suriah memiliki tujuan jangka panjang koalisi adalah untuk membangun negara demokratis dan sipil dari institusi yang memberikan kebebasan, kesetaraan, martabat, dan penghormatan hak asasi manusia kepada semua warga Negara. Komisi Umum Revolusi Suriah digambarkan memiliki platform agresif untuk melengserkan presiden Bashar al-Assad, secara aktif mendukung pemberontak bersenjata melalui dewan militer provinsi, serta menolak untuk bekerja sama dengan Dewan Nasional Suriah (SNC) yang mana bertolak belakang dengan dua kelompok oposisi Suriah lainnya, Dewan Tertinggi Revolusi Suriah (SCSR) dan Komite Koordinasi Lokal (LCC). Komisi Umum Revolusi Suriah dilaporkan menolak untuk bekerja sama dengan SNC (kelompok oposisi yang beroperasi di pengasingan). Hal ini dikarenakan adanya kekecewaan dengan pertengkaran kekuatan internal dengan SNC (*Dawn, 2011*).

2.3. Democratic Federation of Northern Syria (DFNS)

Democratic Federation of Northern Syria atau Federasi Demokratik Suriah Utara, adalah wilayah otonom *de facto* di timur laut Suriah. Federasi Demokratik Suriah Utara terdiri dari tiga daerah pemerintahan sendiri, yaitu Wilayah Afrin, Wilayah Jazira, dan Wilayah Efrat sementara juga berafiliasi dengan dewan lokal di wilayah Raqqa, Tabqa, Manbij dan Deir Ez-Zor. Wilayah ini memperoleh otonomi *de facto* pada tahun 2012 sebagai bagian dari konflik Rojava yang sedang berlangsung dan Perang Sipil Suriah yang lebih luas. Saat menjamu beberapa hubungan luar negeri, DFNS tidak secara resmi diakui sebagai otonom oleh pemerintah Suriah atau negara atau organisasi internasional mana pun. Para pendukung wilayah berpendapat bahwa pemerintahan resmi sekuler berdasarkan ideologi sosialis libertarian yang mempromosikan desentralisasi, kesetaraan jender, kelestarian lingkungan dan toleransi pluralistik untuk keragaman agama, budaya dan politik, dan bahwa nilai-nilai ini tercermin dalam konstitusi, masyarakat, dan politiknya, mengklaimnya sebagai model bagi Suriah yang disatukan secara keseluruhan, daripada kemerdekaan langsung. Beberapa kritik terhadap wilayah tersebut meliputi klaim otoriterisme, kurdifikasi, rekrutmen paksa, pemenjaraan dan pelecehan terhadap pembangkang dan jurnalis, promosi ideologi anti-kapitalis radikal, dan pengaruh dari Partai Pekerja Kurdistan militant (Rudaw, 2016).

2.3.1. Syrian Democratic Council

Syrian Democratic Council atau Dewan Demokrat Suriah adalah sayap politik Pasukan Demokratik Suriah di Federasi Demokrasi Suriah Utara yang otonom secara *de facto*. Dewan Demokratik Suriah didirikan pada 10 Desember 2015 di Al-Malikiyah. Majelis yang membentuk Dewan Demokratik Suriah terdiri dari 13 anggota dari latar belakang etnis, ekonomi, dan politik tertentu.

Pada tanggal 1 Agustus 2016 Dewan Demokratik Suriah membuka kantor publik di Hasakah. Pada 11 September 2016, Gerakan *Syria's Tomorrow Movement* Suriah menandatangani perjanjian kerja sama dengan

Dewan Demokratik Suriah dan administrasi otonom yang terkait dari Federasi Demokratik Suriah Utara. Pada akhir September dan awal Oktober 2016 sebuah forum untuk Dewan Demokratik Suriah diadakan di kota Rmelan, di timur laut Hasakah Governorate. Orang-orang yang menghadiri konferensi termasuk perwakilan dari Jableh, di Kegubernuran Latakia barat (Aljazeera, 2011)

2.3.2. *Syrian Democratic Forces*

Syrian Democratic Forces atau Pasukan Demokrat Suriah, biasanya disingkat SDF adalah aliansi milisi Kurdi, Arab, dan Suriah/Syria, serta beberapa partisipasi Turkmenistan dan Chechnya yang lebih kecil dalam Perang Sipil Suriah. SDF dipimpin secara militer oleh Unit Perlindungan Rakyat (YPG), yang sebagian besar adalah milisi Kurdi. Didirikan pada Oktober 2015, SDF menyatakan misinya sebagai perjuangan untuk menciptakan Suriah yang sekuler, demokratis, dan federal. Konstitusi Federasi Demokratik Suriah Utara yang diperbarui Desember 2016 menyebut SDF sebagai kekuatan pertahanan resminya.

Penentang utama SDF adalah berbagai kelompok pemberontak nasionalis Islam dan Arab yang terlibat dalam perang saudara, khususnya Negara Islam Irak dan Levant (ISIL), kelompok oposisi Suriah yang didukung Turki, afiliasi al-Qaeda, dan sekutu mereka . SDF telah berfokus terutama pada ISIL, berhasil mendorong mereka dari area strategis penting, seperti Al-Hawl, Shaddadi, Bendungan Tishrin, Manbij, al-Tabqah, Bendungan Tabqa, Bendungan Baath, dan bekas ibukota Raqqa di ISIL (Wilgenburg, 2016).

Pembentukan SDF diumumkan pada 11 Oktober 2015 saat konferensi pers di al-Hasakah. Aliansi ini dibangun atas kerja sama yang telah lama terjalin sebelumnya antara mitra pendiri. Sementara Unit Perlindungan Rakyat Unit Perlindungan Wanita telah beroperasi di seluruh kanton DFNS, mitra pendiri lainnya lebih fokus secara geografis.

People's Protection Units

People's Protection Units atau Unit Perlindungan Rakyat adalah milisi terutama Kurdi di Suriah dan komponen utama dari Federasi Demokratik Pasukan Suriah Suriah Utara. Unit Perlindungan Rakyat sebagian besar adalah suku Kurdi, dan juga termasuk orang Arab, sukarelawan asing, dan sangat dekat dengan Dewan Militer Suriah, milisi Asyur.

Unit Perlindungan Rakyat dibentuk pada 2004 sebagai sayap bersenjata Partai Persatuan Demokratik Kurdi yang berhaluan kiri. Ini berkembang pesat dalam Perang Saudara Suriah dan mendominasi kelompok-kelompok Kurdi bersenjata lainnya. Kelompok saudari, Unit Perlindungan Wanita, bertarung bersama mereka. Unit Perlindungan Rakyat aktif di Suriah utara dan timur (Barfi, 2016)

2.4. Gerakan Teroris

Dalam konflik di Suriah terdapat dua kelompok yang diidentifikasi sebagai kelompok teroris baik oleh pemerintah Suriah maupun kelompok oposisi, kedua kelompok ini adalah Islamic State Iraq and Levant dan kelompok al-Nusra yang memiliki hubungan dengan organisasi teroris al-Qaeda

2.4.1. Islamic State Iraq and Levant (ISIL)

Disebut Dā'ash atau Negara Islam Irak dan Levant (abbrv. ISIL atau ISIS [Negara Islam Irak dan Suriah]) memperoleh keuntungan militer yang cepat di Suriah Utara mulai April 2013 dan pada pertengahan 2014 mengendalikan sebagian besar wilayah itu. wilayah, di mana Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menggambarkannya sebagai "kelompok terkuat" (Tuysuz, et al., 2013). Ia telah memberlakukan hukum Syariah yang ketat atas tanah yang dikontrolnya. Kelompok itu, hingga 2014, berafiliasi dengan al-Qaeda, dipimpin oleh pejuang Irak Abu Bakar al-Baghdadi, dan diperkirakan memiliki 7.000 pejuang di Suriah, termasuk banyak non-Suriah. Ia dipuji sebagai tidak begitu korup daripada kelompok milisi lainnya dan dikritik karena menyalahgunakan hak asasi manusia (Amnesty Internasional,

2013) dan karena tidak mentolerir kelompok milisi non-Islam, jurnalis asing atau pekerja bantuan, yang anggotanya telah diusir, dipenjara (Birke, 2013) atau dieksekusi.

2.4.2. Al-Nusra

Al-Qaeda terkait (Reuters, 2016) Front al-Nusra, sebagai kelompok jihadis terbesar di Suriah, sering dianggap sebagai bagian paling agresif dan paling kejam dari oposisi. Bertanggung jawab atas lebih dari 50 pemboman bunuh diri, termasuk beberapa ledakan mematikan di Damaskus pada tahun 2011 dan 2012, diakui sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Suriah dan ditunjuk oleh Amerika Serikat pada Desember 2012. Hal ini telah didukung oleh pemerintah Turki selama bertahun-tahun, menurut penasihat intelijen Amerika Serikat yang dikutip oleh Seymour Hersh. Pada April 2013, pemimpin Negara Islam Irak merilis pernyataan audio yang mengumumkan bahwa Front al-Nusra adalah cabangnya di Suriah. Pemimpin al-Nusra, Abu Mohammad al-Golani, mengatakan bahwa kelompok itu tidak akan bergabung dengan Negara Islam Irak tetapi akan tetap mempertahankan kesetiaan kepada Ayman al-Zawahiri, pemimpin al-Qaeda. Tenaga kerja diperkirakan dari Front al-Nusra adalah sekitar 6.000-10.000 orang, termasuk banyak pejuang asing.

2.5. Negara Asing

2.5.1. Dukungan Pro-Pemerintah

Rusia

Rusia adalah sekutu militer Suriah sejak 1956 dan selama Perang Sipil Suriah, Rusia terus memasok senjata kepada pemerintah Assad, mengirim penasihat militer dan teknis untuk melatih tentara Suriah untuk menggunakan senjata buatan Rusia, dan itu membantu memperbaiki dan memelihara senjata Suriah (The Guardian, 2013). Investigasi oleh wartawan menunjukkan bahwa Rusia membantu menjaga ekonomi Suriah tetap bertahan dengan

mengangkut ratusan ton uang kertas ke negara itu dengan pesawat terbang (The Economist, 2012).

Pada bulan Desember 2012, dilaporkan bahwa personel militer Rusia dengan kedok penasihat militer berada di dalam wilayah Suriah, mengelola beberapa pertahanan anti-pesawat yang dikirim oleh Rusia. Kedalaman dan kecanggihan pertahanan udara Suriah disebut sebagai alasan utama keputusan Amerika Serikat untuk tidak melakukan intervensi militer terhadap pemerintah Suriah atau memaksakan zona larangan terbang (The Economist, 2012).

Iran

Iran dan Suriah adalah sekutu strategis yang dekat, dan Iran telah memberikan dukungan signifikan bagi Suriah dalam Perang Saudara Suriah. Hal ini dikatakan termasuk dukungan teknis, beberapa pasukan tempur, dan \$ 9 miliar dalam dukungan keuangan. Iran memandang perang saudara sebagai front kritis dalam pertempuran eksistensial yang secara langsung berkaitan dengan keamanan geopolitiknya. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan pada September 2011 secara vokal mendukung pemerintah Suriah (Barnard, et al., 2013). Kota Suriah Zabadani sangat penting bagi Assad dan Iran karena, setidaknya hingga Juni 2011, kota tersebut berfungsi sebagai pusat logistik Korps Pengawal Revolusi Iran untuk memasok Hizbullah.

Iraq

Pemerintah Irak telah mengirim dukungan keuangan kepada Assad dari tahun 2011. Irak telah membuka wilayah udaranya untuk digunakan oleh pesawat-pesawat Iran yang mengangkut dukungan kepada pemerintah Suriah, dan telah memberikan truk-truk menuju Suriah yang membawa pasokan dari bagian Pengawal Revolusi Iran melalui wilayah Irak. Pemerintah Irak telah menandatangani perjanjian untuk menyediakan bahan bakar diesel kepada Suriah. Irak telah menyerang ISIL di Deir ez-Zor

beberapa kali. Pada Desember 2018, pemerintah Suriah secara resmi memberi Irak lampu hijau untuk menyerang ISIL di dalam wilayah Suriah tanpa terlebih dahulu meminta izin (Aljazeera, 2018).

2.5.2. Dukungan Pro-Oposisi

Amerika Serikat

Pada bulan April 2013, pemerintahan Obama berjanji untuk menggandakan bantuan tidak mematikan untuk pemberontak, secara spesifik sebesar \$ 250 juta. Pada 13 Juni 2013, pejabat pemerintah Amerika Serikat mengatakan pemerintah, setelah sehari-hari melakukan pertemuan tingkat tinggi, telah menyetujui pemberian persenjataan kepada Dewan Militer Tertinggi (SMC) (Madhani, et al., 2013).

Selama September 2013, dilaporkan oleh para pejabat Amerika Serikat bahwa di bawah “program CIA rahasia,” senjata kecil dan senjata anti tank telah mulai menjangkau beberapa kelompok pemberontak moderat. Meskipun Komandan Tentara Suriah Merdeka Salim Idris membantah menerima bantuan mematikan, beberapa analis berkomentar bahwa informasi mengenai senjata Amerika Serikat mungkin tidak mencapai Idris karena komunikasi yang buruk karena komando Tentara Suriah Merdeka berbasis di Suriah Utara sementara senjata dilaporkan mencapai kelompok pemberontak di selatan (Memcott, 2013).

Inggris

Pada 2012 Inggris memberikan pasukan oposisi dengan bantuan militer yang tidak mematikan, termasuk peralatan komunikasi dan pasokan medis, dan Inggris dilaporkan telah memberikan dukungan intelijen dari pangkalan-pangkalan Siprus-nya, mengungkapkan gerakan militer Suriah kepada pejabat Turki, yang kemudian lulus pada informasi kepada *Free Syrian Army* (Sky News, 2012).

BAB 3. UNCONVENTIONAL WARFARE SEBAGAI STRATEGI UNTUK MEMBELA KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT

Unconventional Warfare adalah sebuah doktrin militer Amerika Serikat yang merupakan salah satu aktivitas inti dari *irregular warfare* (peperangan tidak biasa), *Unconventional Warfare* pada dasarnya adalah dukungan yang diberikan oleh militer terhadap gerakan pemberontak atau perlawanan asing, definisi legal dari *Unconventional Warfare* adalah:

“*Unconventional Warfare* adalah Spektrum yang luas dari operasi militer dan paramiliter, biasanya berdurasi panjang, terutama dilakukan melalui, dengan, atau oleh kekuatan pribumi atau pengganti yang diatur, dilatih, diperlengkapi, didukung, dan diarahkan dalam berbagai tingkatan oleh sumber eksternal, yang melingkupi, tetapi tidak terbatas pada, perang gerilya, subversi, sabotase, kegiatan intelijen, dan bantuan pemulihan yang tidak konvensional” (Department of Defense, 2007: 564).

Unconventional Warfare adalah misi pertama yang diberikan pada *United States Army Special Forces* (Pasukan militer khusus Amerika Serikat) yang biasa disingkat sebagai *Special Forces* (SF) pada saat unit tersebut dibentuk pada tahun 1952, saat ini misi SF telah bertambah melingkupi beberapa tugas lain selain *Unconventional Warfare*. Amerika SF khusus merujuk pada Pasukan militer khusus Amerika Serikat sedangkan kategorisasi unit khusus seperti yang dilakukan di banyak negara disebut sebagai *Special Operation Forces* (Pasukan Operasi Khusus) seluruh unit ini berada di bawah komando *United States Special Operation Command* (USSOCOM), saat ini SF memiliki 7 misi utama selain *Unconventional Warfare* yaitu:

1. *Unconventional Warfare* (*United States Department of Defense doctrine*)
2. *foreign internal defense* (FID)
3. *special reconnaissance* (SR)
4. *direct action* (DA)
5. *counter-terrorism* (CT)
6. *counter-proliferation* (CP)

7. *psychological operations (United States) (PsyOps)*
8. *information operations (IO)*

Misi *Unconventional Warfare* berasumsi bahwa pasukan Amerika Serikat akan bekerja dengan pasukan negara lain dan kemungkinan dengan sekutu Amerika Serikat, operasi *Unconventional Warfare* selalu multinasional. Bergantung pada situasi, peran pasukan *Unconventional Warfare* dapat melingkupi pelatihan murni hingga memimpin pasukan gabungan dalam pertempuran.

3.1. Sejarah *Unconventional Warfare* Amerika Serikat

Ide tentang *Unconventional Warfare* muncul dari gerakan perlawanan yang di dukung oleh Personel dari Amerika Serikat, terutama perlawanan di Filipina melawan invasi dari Jepang dan berbagai gerakan perlawanan nasional di Eropa untuk melawan invasi dari Nazi Jerman. Kekuatan utama dari gerakan ini tidak berasal dari Amerika Serikat, tetapi personel lokal Amerika Serikat yang bekerja sebagai unit di wilayah yang dikuasai musuh seperti unit Merrill's Marauders yang terkenal karena misinya yang melibatkan penetrasi jauh ke dalam wilayah musuh dan seringkali terlibat kontak senjata melawan pasukan dengan jumlah yang lebih besar.

Pasukan Amerika Serikat pertama kali terlibat dalam operasi *Unconventional Warfare* di Filipina, dimana pasukan Amerika Serikat yang menolak untuk menyerah terhadap Jepang seperti Kolonel Wendell Fertig dan Letkol. Russell W. Volckmann (Brooks, 2003), bekerja sama dengan pasukan Filipina yang memiliki pemikiran yang sama, Fertig bersama pemimpin pasukan Amerika Serikat dan Filipina berkumpul dan memutuskan untuk mengumpulkan dan melatih pasukan gerilya untuk melawan pasukan Jepang, mereka berhasil melatih puluhan ribu prajurit untuk melawan Jepang dengan pengalaman mereka dalam pertempuran Fertig dan Volckmann memformulasikan doktrin awal dari *Unconventional Warfare*, Kemampuan prajurit berpengalaman untuk melatih dan memimpin pasukan dalam jumlah yang besar adalah prinsip yang mendasari pembentukan SF di tahun 1952.

Setelah Perang Dunia II misi *Unconventional Warfare* pertama yang diberikan kepada SF ditunjukkan dengan pengiriman SF dari *10th Special Forces Group* ke Eropa, adalah untuk berjaga-jaga terhadap serangan Soviet ke wilayah Eropa Barat. SF bertugas membantu menata, melatih, dan memimpin gerakan perlawanan terhadap invasi semacam ini. Pada tahun 1951, doktrin *Unconventional Warfare* yang pada saat itu masih disebut sebagai Perang Gerilya adalah:

“Peperangan tidak konvensional terdiri dari medan perang gerilya yang saling terkait, penghindaran dan pelarian, dan subversi terhadap negara-negara yang bermusuhan (perlawanan). Operasi *Unconventional Warfare* dilakukan di wilayah musuh atau wilayah yang dikontrol musuh oleh personel pribumi yang biasanya didukung dan diarahkan dalam berbagai tingkatan oleh sumber eksternal.” (Department of the Army, 1961)

Pada tahun 1998, Jenderal Peter J. Schoomaker, yang pada saat itu menjabat sebagai komandan USSOCOM dan kemudian ketua Kepala Staf Gabungan mengatakan kepada Robert E. Kelley "Peperangan tidak konvensional bukanlah misi yang layak untuk Pasukan Khusus. Satu-satunya alasan untuk berlatih dalam peperangan tidak konvensional adalah karena latihan ini merupakan cara terbaik untuk mempertahankan keahlian Pasukan Khusus" Kelley juga mengutip Army Special Forces Vision XXI edisi oktober 1997 yang mengatakan "Unsur-unsur pemberontak adalah kunci untuk potensi misi *Unconventional Warfare* di wilayah mana pun. Selama ada pemberontak, akan ada potensi *Unconventional Warfare* untuk mendukung kepentingan nasional A.S" (Kelley, 2000).

Jenderal Schoomaker menggunakan istilah pengintai global untuk menggambarkan peran yang dimiliki Pasukan Khusus dalam "mempersiapkan medan perang" sebelum pasukan reguler memasukinya. Sebagai contoh, tahap akhir operasi PBB di Somalia mendapatkan hasil yang mengecewakan karena tujuan yang terlalu ambisius yang mengakibatkan Pertempuran Mogadishu, tim SF mendahului unit Korps Marinir Amerika Serikat yang membentuk pasukan bantuan terbuka pertama, dan melakukan kontak dengan berbagai klan yang diperlukan kerjasamanya. Kontak semacam ini merupakan tahap awal dari model operasi *Unconventional Warfare*, tanpa bergerak ke fase tempur. Selain pengintaian

khusus, pengumpulan informasi semacam itu belum terdaftar sebagai misi dasar SF. Kelley menyarankan bahwa doktrin SF *Unconventional Warfare* direvisi untuk memasukkan kegiatan seperti:

1. Kegiatan intelijen dalam lingkungan *Unconventional Warfare* harus menjadi area pertama yang dialamatkan: peran pengintai global. Hal ini bias di sertakan ke dalam doktrin *Unconventional Warfare* yang ada jika terdapat pemahaman bahwa gerakan perlawanan mungkin tidak perlu terlibat dalam pertempuran langsung
2. Kegiatan subversi dan sabotase perlu dijadikan prioritas, dan diperbarui. Pembaruan harus menekankan bahwa tindakan dan penggunaan kekerasan mungkin tidak diperlukan jika, misalnya, komunikasi dan jaringan komputer dapat diganggu dengan operasi informasi jarak jauh
3. Unit SF telah membantu pemberontakan yang beragam seperti Contras dan Aliansi Utara. Peran sebagai pendukung dan bukan pemimpin belum dirumuskan dalam doktrin SF *Unconventional Warfare*
4. Revisi doktrin *Unconventional Warfare* untuk mengambil pandangan yang lebih modern mengenai perang gerilya harus dilakukan, karena sangat berbeda dengan model saat ini yang menekankan pada kepemimpinan partisan pedesaan yang bergaya Perang Dunia II.

Kelley menyimpulkan bahwa *Unconventional Warfare* tetap merupakan misi yang layak, tetapi menurutnya, doktrin *Unconventional Warfare* pada tahun 2000, sudah ketinggalan jaman. Sejak Perang Dunia II, pasukan Amerika Serikat sudah sangat jarang memimpin dan melatih pasukan gerilya. Mereka melakukannya di Laos, tetapi, di Afghanistan dan di tempat lain, mereka hanya mendukung pasukan pemberontak yang telah ada. Sebagai contoh, misi *Unconventional Warfare* kadang-kadang diprakarsai oleh personel paramiliter dari *Central Intelligence Agency* (CIA), terkadang dengan personel SF yang dipinjamkan ke CIA dengan rahasia. seperti kegiatan CIA di Laos. Pada akhirnya, pasukan *Unconventional Warfare* ini akan kembali di bawah kendali Angkatan Darat Amerika Serikat. Dalam Perang Vietnam, unit-unit yang dipimpin SF melakukan tindakan ofensif

terhadap lawan di Ho Chi Minh Trail dan jalur infiltrasi lainnya. Semakin banyak personil SF mengambil misi lain, terutama SR dan DA.

Pada tahun 1990 hingga tahun 1991, misi *Unconventional Warfare* mendukung pengumpulan intelijen, sabotase, dan subversi oleh gerakan bawah tanah Kuwait. Pada tahun 2001, *Unconventional Warfare* memiliki peran besar dalam mendukung Aliansi Utara di Afghanistan. *Unconventional Warfare* lebih berfokus dalam pengumpulan intelijen, subversi dan sabotase oleh para pemberontak, dan sangat jarang pada pertempuran langsung melalui penyerangan dan penyergapan. Doktrin saat ini memungkinkan keduanya; sehingga mungkin diperlukan adanya perubahan penekanan.

3.2. Peranan *Unconventional Warfare* dalam Strategi Nasional Amerika Serikat

Terdapat tiga dokumen yang menjelaskan strategi nasional Amerika Serikat: Strategi Keamanan Nasional, Strategi Pertahanan Nasional, dan Strategi Militer Nasional. Strategi Keamanan Nasional menyatakan kepentingan dan tujuan Presiden. Strategi Pertahanan Nasional adalah kontribusi *Department of Defense* (DOD) untuk Strategi Keamanan Nasional. Strategi Pertahanan Nasional juga menyediakan kerangka kerja untuk panduan strategis DOD lainnya, khususnya untuk perencanaan operasi militer dan rencana cadangan, pengembangan kekuatan, serta intelijen. Sasaran dan tujuan Strategi Keamanan Nasional dari Presiden mempengaruhi Strategi Militer Nasional. Selain itu, Strategi Militer Nasional menerapkan Strategi Pertahanan Nasional dari Sekretaris Pertahanan. Strategi Militer Nasional memberikan fokus untuk kegiatan militer dengan mendefinisikan satu set tujuan militer yang saling terkait. Dukungan Pemerintah Amerika Serikat (USG) untuk perlawanan atau pemberontakan dapat diwujudkan dalam beberapa cara, yaitu:

1. Dukungan tidak langsung. Dalam skenario perang terbatas, dukungan nyata Amerika Serikat terhadap gerakan perlawanan terkadang tidak diinginkan. Dalam kasus ini, USG dapat secara tidak langsung memberikan dukungan

melalui sekutu atau lokasi di negara ketiga. USG biasanya membatasi dukungan tidak langsung ke bantuan logistik dan pelatihan. Perang terbatas menghadirkan lingkungan yang jauh lebih ketat yang membutuhkan proses pelaksanaan secara tidak mencolok atau rahasia dari semua operasi yang didukung USG.

2. Dukungan langsung (tidak pada pertempuran). Dalam skenario perang umum, visibilitas dukungan USG tidak terlalu dipermasalahkan, hal ini memperluas kemungkinan dukungan yang dapat diberikan oleh USG sehingga dukungan logistik, pelatihan, dan bantuan penasihat yang lebih luas dapat diberikan. Bantuan Amerika Serikat dapat mencakup penasihat di wilayah suka atau daerah yang dikuasai pemberontak yang tidak terlibat pertempuran langsung. Amerika Serikat juga dapat memberikan bantuan melalui negara tetangga.
3. Dukungan tempur. Dukungan tempur mencakup semua kegiatan dukungan langsung dan tidak langsung di samping operasi tempur.

Sebelum memberikan dukungan kepada gerakan perlawanan atau pemberontakan, perencana harus mempertimbangkan bagaimana ideologi dan tujuan gerakan perlawanan mempengaruhi kepentingan strategis di kawasan tersebut. Perencana harus memastikan para pemimpin telah dengan jelas mendefinisikan strategi dan sasaran nasional Amerika Serikat sebelum membuat keputusan apa pun mengenai dukungan terhadap gerakan perlawanan atau pemberontakan. Tanpa pemahaman yang jelas tentang efek yang diinginkan dan hasil akhir untuk suatu wilayah atau konflik, tidak mungkin untuk menilai apakah dukungan terhadap perlawanan atau pemberontakan akan mencapai hasil yang menguntungkan.

Perencana yang baik harus mempertimbangkan manfaat dari memberikan dukungan kepada pasukan perlawanan terhadap konteks strategis operasi secara keseluruhan. Mereka tidak boleh membiarkan keinginan untuk melakukan *Unconventional Warfare* atau menghasilkan efek militer murni mendominasi penilaian mereka. Dukungan untuk pasukan perlawanan tidak hanya berpengaruh pada upaya militer; hal ini juga pasti akan mengubah lanskap geopolitik di wilayah

tersebut. perencana dapat menganggap upaya pemberontakan tertentu sesuai dan layak dengan bantuan militer yang akan diberikan, tetapi menganggapnya sebagai strategi yang tidak menguntungkan karena risiko politik yang dapat terjadi atau potensi peningkatan ketidakstabilan regional di wilayah operasi.

3.3. Metode Amerika Serikat dalam melakukan *Unconventional Warfare*

Amerika Serikat melakukan dua jenis *Unconventional Warfare*. *Unconventional Warfare* dengan antisipasi keterlibatan militer Amerika Serikat dalam skala besar atau tanpa antisipasi keterlibatan militer Amerika Serikat dalam skala besar.

3.3.1. Penilaian Kelayakan Pemberian Bantuan

Sebelum Amerika Serikat dapat melakukan operasi *Unconventional Warfare*, penilaian terhadap kelayakan pemberian bantuan terhadap gerakan perlawanan sangat dibutuhkan, selain untuk memastikan bahwa gerakan perlawanan dan pemerintah Amerika Serikat memiliki tujuan yang sama, penilaian ini juga dibutuhkan agar gerakan perlawanan tersebut tidak bertindak diluar norma internasional dan memberikan kesan buruk terhadap Amerika Serikat sebagai negara yang mendukung mereka.

Pemilihan *Unconventional Warfare* sebagai Strategi memiliki beberapa pertimbangan yang didasarkan pada kemungkinan kesuksesan *Unconventional Warfare* dalam operasi tersebut, terdapat beberapa parameter yang menentukan suatu operasi dapat di sponsori oleh Amerika Serikat. parameter tersebut antara lain adalah;

1. Adakah kelompok-kelompok yang dapat berkembang menjadi kekuatan yang layak mendapat bantuan?
2. Apakah Amerika Serikat memiliki atau dapat melakukan kontak dengan individu yang mewakili potensi resistensi di suatu daerah?
3. Adakah pemimpin yang cakap, yang memiliki tujuan kompatibel dengan Amerika Serikat dan bersedia bekerja sama dengan Amerika Serikat?

4. Dapatkah Amerika Serikat mempengaruhi para pemimpin untuk tetap mematuhi tujuan Amerika Serikat?
5. Apakah taktik dan aktifitas pertempuran kelompok resistensi dapat diterima sesuai dengan standar militer dan populasi Amerika Serikat?
6. Akankah lingkungan secara geografis dan demografis mendukung operasi-operasi perlawanan?
7. Apakah musuh secara efektif mengendalikan populasi?
8. Apakah potensi keuntungan sebanding dengan potensi risikonya?
9. Apakah partisipasi kelompok ini secara politis dapat diterima oleh mitra regional lainnya?

Seluruh parameter diatas harus mendapatkan hasil yang memuaskan agar operasi *Unconventional Warfare* dapat berjalan dengan lancar, dan untuk membantu penyesuaian parameter elemen-elemen *Unconventional Warfare* dapat melakukan kontak langsung dengan kelompok resistensi untuk memberikan saran dan himbauan agar gerakan resistensi tersebut dapat memenuhi parameter yang di inginkan dan mendapat bantuan dari pemerintah Amerika Serikat (Department of the Army, 2010: 1-6).

3.3.2. Elemen Unconventional Warfare

Elemen dalam *Unconventional Warfare* adalah unit yang memiliki fungsi vital dalam pelaksanaan operasi *Unconventional Warfare* mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga akhir operasi, terdapat tiga elemen utama dari *Unconventional Warfare* yaitu:

Special Forces

Pasukan khusus dalam operasi *Unconventional Warfare* adalah unit pertama yang melakukan kontak dengan gerakan perlawanan dan memiliki tugas utama melatih pasukan pemberontak dalam strategi militer dan perang gerilya, pasukan khusus juga memiliki fungsi koordinasi dengan elemen *Unconventional Warfare* yang lain.

Military Information Support Operation

Operasi Dukungan Informasi Militer, seperti namanya MISO adalah elemen *Unconventional Warfare* yang berfungsi sebagai basis operasi intelijen dalam *Unconventional Warfare*, MISO melatih pemimpin gerakan perlawanan dalam kemampuan manajemen informasi, mengidentifikasi efek psikologis yang diinginkan dari operasi, membentuk opini populer yang mendukung tujuan *Unconventional Warfare*, dan melawan disinformasi dari musuh yang dapat memberikan efek negative terhadap operasi *Unconventional Warfare*

Civil Affairs

Civil Affairs merupakan elemen *Unconventional Warfare* yang bertindak sebagai penasihat hubungan public, CA memiliki tugas mengumpulkan dukungan dari rakyat dan memberikan bantuan terhadap warga sipil yang terkena dampak konflik melalui operasi kemanusiaan, walaupun perannya tergolong minimal, namun CA memiliki tugas yang amat penting dalam proses operasi *Unconventional Warfare*.

3.3.3. Tujuh Fase *Unconventional Warfare*

Terdapat 7 fase dalam pelaksanaan operasi *Unconventional Warfare* yang meliputi proses persiapan hingga tahap akhir dari operasi 7 tahap tersebut adalah;

1. Fase Persiapan : gerakan perlawanan bersama sponsor luar melakukan persiapan psikologis untuk menyatukan rakyat melawan pemerintah yang berdaulat dan menyiapkan rakyat untuk mendapat bantuan dari Amerika Serikat
2. Fase kontak awal : agen pemerintah Amerika Serikat melakukan kontak dengan pemimpin pergerakan untuk menentukan dukungan yang diharapkan

3. Fase penyusupan : Pasukan Khusus melakukan penyusupan ke dalam wilayah, membangun komunikasi dengan markas pusat dan melakukan kontak dengan gerakan perlawanan
4. Fase Organisasi : Pasukan Khusus mengorganisasi, Melatih, dan mempersenjatai pemberontak dengan emphasis pada pembangunan infrastruktur
5. Fase Pembangunan : Pasukan Khusus membantu pemberontak dalam mengembangkan organisasi perlawanan yang efektif. Operasi tempur terbatas dapat dilakukan dalam fase ini
6. Fase Pergerakan : Pasukan *Unconventional Warfare* melakukan operasi tempur hingga konflik berakhir atau Amerika Serikat meluncurkan pasukan konvensional
7. Fase Transisi : Setelah operasi berhasil *Unconventional Warfare* beralih ke kontrol nasional, menjadi pasukan biasa, atau dibubarkan.

3.3.4. Skenario Perang Umum

Terdapat dua kemungkinan tujuan penggunaan *Unconventional Warfare* dalam operasi skala besar Amerika Serikat, yaitu untuk memfasilitasi masuknya pasukan konvensional atau untuk mengalihkan perhatian dan sumber daya musuh dari suatu bagian lain dalam area operasional. Kekuatan *Unconventional Warfare* dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam persiapan psikologis populasi untuk menerima masuknya militer konvensional. Lebih jauh lagi, tipu muslihat dan tindakan-tindakan lain dapat meyakinkan para pemimpin musuh untuk mengalihkan sumber daya mereka dari area utama operasi walaupun sebenarnya mereka tidak perlu melakukannya. Sebagai contoh, Amerika Serikat dapat menyebarluaskan pesan-pesan yang memberi kesan bahwa operasi gerilya akan terjadi di lokasi-lokasi tertentu, yang menyebabkan para pemimpin musuh mengalihkan kekuatan mereka dari rute awal untuk menghadapi ancaman yang sebenarnya tidak pernah ada. Contoh upaya *Unconventional Warfare* semacam ini dilakukan oleh Amerika Serikat dalam operasi berikut:

1. Teater Eropa dan Pasifik (1942–1945).
2. Korea Utara (1951–1953).
3. Rencana persiapan Perang Dingin untuk Eropa Timur (1952–1989).
4. Kuwait (1990–1991).
5. Afghanistan (2001–2002).
6. Irak (2002–2003).

Dalam *Unconventional Warfare* skala besar, operasi sebagian besar berfokus pada aspek militer dari konflik karena kekuatan konvensional pada akhirnya akan masuk ke dalam wilayah tersebut. Dalam hal ini tugas *Unconventional Warfare* umumnya adalah untuk mengganggu atau menurunkan kemampuan militer musuh dan membuat mereka lebih rentan terhadap kekuatan pasukan invasi konvensional yang akan datang setelahnya. Amerika Serikat dapat menggunakan tindakan dan informasi untuk meningkatkan gangguan dan mengikis kapabilitas musuh dengan menurunkan moral dan kesatuan unit mereka. Hal ini dapat meningkatkan jumlah desersi, menyerah, dan berpura-pura sakit di dalam organisasi mereka. Penggunaan teknik semacam itu meningkatkan potensi kerusakan unit musuh hingga membuat mereka tidak efektif dalam pertempuran.

Pasukan perlawanan mengambil resiko yang lebih besar dalam skenario keterlibatan berskala besar dengan mengekspose hampir seluruh infrastruktur mereka demi kemungkinan keberhasilan dan kontak dengan pasukan koalisi saat invasi akhirnya terjadi. Tantangan utamanya adalah menyinkronkan upaya-upaya perlawanan sambil mempertahankan tingkat keamanan operasional untuk invasi.

Jika tujuan dari operasi *Unconventional Warfare* adalah untuk menyiapkan suatu area untuk memfasilitasi masuknya pasukan invasi, tantangannya adalah untuk memastikan bahwa operasi perlawanan menjadi pelengkap (dan tidak mengganggu apalagi menggagalkan) operasi dari pasukan invasi. Jika waktunya salah atau pasukan invasi konvensional gagal untuk membebaskan wilayah dan melakukan kontak dengan pasukan perlawanan, ada kemungkinan bahwa organisasi perlawanan (gerilyawan,

gerakan bawah tanah, dan personel pendukung) akan menderita kerugian yang signifikan.

Dengan beberapa pengecualian, relatif mudah bagi pasukan Amerika Serikat untuk memaksa musuh untuk mengirimkan pasukan ke area yang jauh dari kemungkinan lokasi invasi. Tantangan dalam skenario ini adalah menentukan tindakan apa dari gerakan perlawanan yang dapat memicu respon yang diinginkan dan kapan waktu yang tepat untuk memulai operasi tersebut agar dapat memengaruhi siklus keputusan musuh secara tepat. Jika pasukan Amerika Serikat tidak mengkoordinasikan operasi ini dengan pasukan invasi atau membuat kesalahan dalam pemilihan waktu, mereka dapat menyebabkan konsekuensi negatif yang signifikan.

3.3.5. Skenario Perang Terbatas

Secara umum, Amerika Serikat menggunakan operasi keterlibatan terbatas untuk menekan musuh. Contoh upaya *Unconventional Warfare* jenis ini oleh Amerika Serikat meliputi:

1. Negara Baltik (Estonia, Lituania, Latvia – 1950an).
2. Guatemala (1954).
3. Albania (1949–1954).
4. Tibet (1955–1965).
5. Indonesia (1958).
6. Kuba (1960-an).
7. Vietnam Utara (1961–1964).
8. Afghanistan (1980-an).
9. Nikaragua (1980-an).

Selama misi keterlibatan terbatas, keseluruhan operasi berlangsung tanpa adanya permusuhan atau bahkan keterlibatan yang tampak dari sponsor. Operasi semacam ini berjalan dalam aspek politik yang strategis dan sensitif. Biasanya, Amerika Serikat membatasi keterlibatan langsungnya, sehingga mengurangi risiko konsekuensi yang tidak diinginkan atau eskalasi konflik

yang terlalu dini. Selama operasi keterlibatan terbatas, metode bagaimana pasukan beroperasi memiliki perbedaan secara signifikan dari skenario keterlibatan berskala besar. Tanpa dukungan dari kekuatan invasi konvensional, pasukan perlawanan harus membatasi paparan terhadap kekuatan dan infrastruktur pendukung mereka untuk mempertahankan operasi selama periode yang panjang. Pasukan harus menjalankan operasi dengan mempertimbangkan respon dan kemungkinan balasan musuh.

Jika serangan balasan terjadi, gerakan perlawanan dapat mengeksploitasi konsekuensi negatif dari serangan tersebut untuk mengumpulkan lebih banyak simpati dan dukungan dari penduduk dengan menekankan pengorbanan dan penderitaan yang dialami gerakan perlawanan demi kepentingan "rakyat". Jika pembalasan tidak berjalan efektif atau tidak terjadi, kelompok perlawanan dapat menggunakan ini sebagai bukti kemampuannya untuk melancarkan serangan yang efektif terhadap musuh. Selain itu, perlawanan dapat melakukan propaganda dengan mengeksploitasi ketidakmampuan atau keengganan musuh untuk membalas sebagai kelemahan, yang akan melemahkan moral serta kekuatan musuh dan menanamkan keyakinan bahwa mereka akan mengalami kekalahan.

BAB 5. KESIMPULAN

Intervensi Amerika Serikat di Suriah dilakukan menggunakan strategi Unconventional Warfare yang dirancang untuk memberikan dukungan berupa pendanaan, pelatihan, dan persenjataan terhadap pemberontak dan melemahkan pemerintah melalui tindakan subversif baik secara lokal maupun internasional tanpa terjun langsung ke dalam konflik. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi konflik di Suriah dan konstelasi politik di kawasan tersebut.

Amerika Serikat memiliki keinginan yang kuat untuk menjatuhkan Rezim Bashar al-Assad yang selama ini menjadi penghalang bagi kepentingan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Sejak serangan Amerika ke Iraq pada tahun 2003 hubungan antara Amerika Serikat dan Suriah memburuk dan mencapai puncaknya saat terjadi pembunuhan terhadap mantan perdana menteri Lebanon Rafic Hariri yang berujung pada pemutusan hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Suriah.

Konflik Suriah yang terjadi pada tahun 2011 adalah sebuah kesempatan bagi Amerika untuk menjatuhkan Bashar al-Assad, namun Amerika tidak bisa melakukan Invasi ke Suriah. Intervensi terutama dalam bentuk invasi diatur dengan sangat ketat dalam hukum internasional. Beberapa pengecualian dimana sebuah negara diberikan hak untuk melakukan intervensi terhadap negara lain, yaitu: pertama sebagai bagian dari intervensi bersama sesuai dengan piagam PBB. Kedua, untuk melindungi hak dan kepentingan warga negaranya di luar negeri. Ketiga, untuk membela diri, dilakukan bila intervensi dibutuhkan untuk menghindari kemungkinan serangan bersenjata. Keempat, untuk menyelesaikan permasalahan di dalam wilayah protektoratnya. Kelima, terhadap sebuah negara melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, seperti melakukan intervensi tanpa dasar hukum.

Selain dari pengecualian di atas sebuah negara tidak diperbolehkan melakukan intervensi terhadap negara lain. Konflik yang terjadi di Suriah adalah konflik internal dan tidak memenuhi satupun pengecualian yang memberikan hak untuk melakukan invasi ke Suriah. Alasan lain yang membuat Amerika Serikat

tidak bisa melakukan invasi terhadap Suriah adalah hubungan antara Suriah dan Rusia. Rusia adalah salah satu anggota dewan keamanan PBB dan juga merupakan salah satu dari sedikit negara yang memiliki kemampuan militer setara dengan Amerika Serikat. Amerika tidak bisa melakukan invasi terhadap sekutu Rusia dan memberi Rusia alasan untuk melakukan perang terbuka dengan Amerika Serikat. Resiko perang terbuka antara Amerika Serikat dan Rusia bukanlah resiko yang bisa ditanggung oleh Amerika.

Berdasarkan pertimbangan diatas Amerika Serikat memutuskan untuk menggunakan Strategi Unconventional Warfare. Strategi Unconventional Warfare yang digunakan Amerika di Suriah disesuaikan dengan kondisi konflik di Suriah sehingga memiliki perbedaan dengan Manual Unconventional Warfare Amerika Serikat dalam hal tahapan pelaksanaan, namun secara fundamental strategi yang digunakan Amerika Serikat di Suriah masih mengikuti Manual Unconventional Warfare Amerika Serikat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Blum, William. 2003. Killing Hope U.S. Military and CIA Interventions Since World War II – Part I. London : Zed Books Ltd, 2003.

Briggs, Billy. 2007. Secrets of the dead. London : The Guardian, 2007.

Brinkley, Alan. 2012. American history : connecting with the past. Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2012.

Brooks, M Evan. 2003. Military History's Top 10 Lists. Bexley, Ohio : Gramercy Books, 2003.

Clements, Kendrick A. 1992. The presidency of Woodrow Wilson. Kansas : University Press of Kansas, 1992.

Department of Defense (DoD). 2007. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms JP 1-02. 2007.

Department of the Army (DA). 2010. Special Forces Unconventional Warfare. Washington : Department of the Army, 2010.

Ebbert, Jean and Hall, Marie-Beth. 1999. Crossed Currents: Navy Women in a Century of Change. Washington : Potomac Books Inc, 1999.

Hall, Thomas E. and Ferguson, J.David. 1998. The Great Depression: An International Disaster of Perverse Economic Policies. Michigan : University of Michigan Press, 1998.

Heckscher, August. 1991. Woodrow Wilson: A Biography. New York : Macmillan, 1991.

- Kelley, Robert E. 2000. U.S. Army Special Forces Unconventional Warfare Doctrine: Engine of Change or Relic of the Past? Newport, Rhode Island : U.S. Naval War College, 2000.
- Koistinen, Paul A. C. 2004. Arsenal of World War II: The Political Economy of American Warfare, 1940-1945. Kansas : University Press of Kansas, 2004.
- Link, Arthur S. 1960. Wilson, Volume III: The Struggle for Neutrality, 1914-1915. New Jersey : Princeton University Press, 1960.
- , 1972. Woodrow Wilson and the Progressive Era, 1910–1917. New York : Harper & Row, 1972.
- Mas'oed, Mohtar. 1990. Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin, dan Metodologi. Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin, dan Metodologi. Jakarta : LP3ES, 1990, p. 219.
- OPCW. 2014. THIRD REPORT OF THE OPCW FACT-FINDING MISSION IN SYRIA. s.l. : OPCW, 2014.
- Risen, James. 2000. New York Times Special Report: The C.I.A. in Iran. New York : The New York Times Company, 2000.
- Roose, Kenneth D. 1969. The economics of recession and revival. Connecticut : Archon Books, 1969.
- Shimko, Keith L. 2010. The Iraq Wars and America's Military Revolution. New York : cambridge university press, 2010.
- Starke, J.G. 1972. An introduction to international law. London : Butterworths, 1972.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, 2008.

The Recession of 1937-38. Roose, Kenneth D. 1948. 3, Chicago : The University of Chicago Press, 1948, Vol. 56.

Yin, Robert K. 2011. Qualitative Research from Start to Finish. Qualitative Research from Start to Finish. New York : The Guilford Press, 2011.

Report:

Correll, John T. 1999. About the "Powell Doctrine". s.l. : Air Force Magazines, 1999.

Holliday, Joseph. 2011. The Struggle for Syria in 2011. MIDDLE EAST SECURITY REPORT. 12 2011.

What The War Is Doing to Us. Witte, Edwin E. 1943. 1, Cambridge : Cambridge University Press, 1943, Vol. 5.

Jurnal:

Hersh, Seymour M. 2016. Military to Military Seymour M. Hersh on US intelligence sharing in the Syrian war. London Review of Books. 1 7, 2016, Vol. 38, 1.

-----, 2016. The Red Line and the Rat Line. London Review of Books. 2016, Vol. 36, 8.

Internet:

Abedine, Saad and Smith-Spark, Laura. 2012. U.S. blacklists al-Nusra Front fighters in Syria. CNN. [Online] 12 12, 2012. [*Diakses pada:* 1 15, 2019.] <https://edition.cnn.com/2012/12/11/world/meast/syria-civil-war/index.html>.

Al Jazeera. 2012. Scores more soldiers defect from Syrian army. www.aljazeera.com. [Online] 1 7, 2012. [*Diakses pada:* 1 6, 2019.]

<https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/01/20121772734954345.html>.

al-akhbar. 2012. syrian opposition. www.al-akhbar.com. [Online] 7 19, 2012. [Diakses pada: 1 7, 2019.] <http://english.al-akhbar.com:80/gi-files/5293788syrian-opposition>.

Aljazeera. 2018. Damascus allows Iraq to hit ISIL targets in Syria: State media. <https://www.aljazeera.com>. [Online] 12 31, 2018. [Diakses pada: 1 5, 2019.] <https://www.aljazeera.com/news/2018/12/damascus-iraq-hit-isil-targets-syria-state-media-181230172409718.html>.

al-khouy, Firas. 2011. Graffiti Wars and Syria's Spray Man. www.al-akhbar.com. [Online] 10 6, 2011. [Diakses pada: 1 7, 2019.] <http://english.al-akhbar.com/node/999>.

Amnesty Internasional. 2013. Syria: Harrowing torture, summary killings in secret ISIS detention centres. <https://www.amnesty.org>. [Online] 12 19, 2013. [Diakses pada: 1 6, 2019.] <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/12/syria-harrowing-torture-summary-killings-secret-isis-detention-centres/>.

Apps, Peter. 2012. Analysis: Syria's Assad faces growing rebel, foreign threat. uk.reuters.com. [Online] 7 27, 2012. [Diakses pada: 1 6, 2019.] <https://uk.reuters.com/article/uk-syria-escalation/analysis-syrias-assad-faces-growing-rebel-foreign-threat-idUKBRE85Q11C20120627>.

Bakri, Nada. 2011. Defectors Claim Attack That Killed Syria Soldiers. www.nytimes.com. [Online] 10 26, 2011. [Diakses pada: 1 7, 2019.] <https://www.nytimes.com/2011/10/27/world/middleeast/army-defectors-in-syria-take-credit-for-deadly-attack.html>.

Barnard, Anne and Rudoren, Jodi. 2013. <https://www.nytimes.com>. [Online] 12 31, 2013. [Diakses pada: 1 9, 2019.]

https://www.nytimes.com/2013/02/01/world/middleeast/syrias-confirmation-of-airstrike-may-undercut-israels-strategy-of-silence.html?_r=0.

BBC. 2011. Mid-East unrest: Syrian protests in Damascus and Aleppo. www.bbc.com. [Online] 3 15, 2011. [Diakses pada: 1 7, 2019.] <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-12749674>.

-----, 2012. Syria conflict: UK to give extra £5m to opposition groups. www.bbc.com. [Online] 8 10, 2012. [Diakses pada: 1 6, 2019.] <https://www.bbc.com/news/uk-19205204>.

Beeley, Vanessa. 2015. 'Humanitarian' Propaganda War Against Syria – Led by Avaaz and *The White Helmets*. 21stcenturywire.com. [Online] oktober 2, 2015. [Diakses pada: 1 8, 2019.] <http://21stcenturywire.com/2015/10/02/humanitarian-propaganda-war-against-syria-led-by-avaaz-and-the-white-helmets/>.

Birke, Sarah. 2013. How al-Qaeda Changed the Syrian War. www.nybooks.com. [Online] 12 27, 2013. [Diakses pada: 1 8, 2019.] <https://www.nybooks.com/daily/2013/12/27/how-al-qaeda-changed-syrian-war/>.

Black, Ian. 2015. US axes \$500m scheme to train Syrian rebels, says NYT. www.theguardian.com. [Online] oktober 9, 2015. [Diakses pada: 1 9, 2019.] <https://www.theguardian.com/world/2015/oct/09/us-to-axe-5-scheme-train-syrian-rebels-nyt>.

Borger, Julian and Hopkins, Nick. 2013. West training Syrian rebels in Jordan. www.theguardian.com. [Online] 3 8, 2013. [Diakses pada: 1 9, 2019.] <https://www.theguardian.com/world/2013/mar/08/west-training-syrian-rebels-jordan>.

Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR) News Release. 2015. Airstrikes Hit ISIL Terrorists in Syria, Iraq. U.S. Department of Defense. [Online] september 30, 2015. <https://www.defense.gov/News/Article/Article/621107/airstrikes-hit-isil-terrorists-in-syria-iraq/>.

DeYoung, Karen and Warrick, Joby. 2013. Iran and Hezbollah build militia networks in Syria, officials say. *theguardian.com*. [Online] 2 12, 2013. [Diakses pada: 1 15, 2019.] <https://www.theguardian.com/world/2013/feb/12/iran-hezbollah-milita-networks-syria>.

Enders, David and Landay, Jonathan S. 2013. One year in, will Syria become a guerrilla war? *www.mcclatchydc.com*. [Online] 9 25, 2013. [Diakses pada: 1 6, 2019.] <https://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/world/article24726148.html>.

European Parliament. 2016. Syria's White Helmets: "We need a no-fly zone and humanitarian corridors". *www.europarl.europa.eu*. [Online] 12 6, 2016. [Diakses pada: 1 7, 2019.] <http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20161202STO54435/syria-s-white-helmets-we-need-a-no-fly-zone-and-humanitarian-corridors>.

Fountain, Henry. 2015. Researchers Link Syrian Conflict to a Drought Made Worse by Climate Change. *www.nytimes.com*. [Online] 3 2, 2015. [Diakses pada: 1 8, 2019.] <https://www.nytimes.com/2015/03/03/science/earth/study-links-syria-conflict-to-drought-caused-by-climate-change.html>.

globalsecurity. 2017. Syrian Arab Navy. *www.globalsecurity.org*. [Online] 2 11, 2017. [Diakses pada: 1 5, 2019.] <https://www.globalsecurity.org/military/world/syria/navy.htm>.

- Heffez, Adam. 2013. Using Women to Win in Syria. www.al-monitor.com. [Online] 7 29, 2013. [*Diakses pada*: 1 5, 2019.] <http://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2013/09/women-fighters-syria-rebels-regime.html>.
- Holmes, Oliver. 2011. Assad's Devious, Cruel Plan to Stay in Power By Dividing Syria—And Why It's Working. newrepublic.com. [Online] 8 15, 2011. [*Diakses pada*: 1 15, 2019.] <https://newrepublic.com/article/93286/syria-assad-shabbiha-sectarianism>.
- Jackson, Richard. 2017. War on terrorism. www.britannica.com. [Online] april 27, 2017. [*Diakses pada*: 1 8, 2019.] <https://www.britannica.com/topic/war-on-terrorism>.
- Kahn, Gabe. 2011. Bloody Syrian Protests Continue. <http://www.israelnationalnews.com>. [Online] 3 21, 2011. [*Diakses pada*: 1 9, 2019.] <http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/143026>.
- Kelley, Michael. 2012. The US Government Sent Blackwater Veteran To Fight With Rebels In Libya And Syria. www.businessinsider.com. [Online] 3 20, 2012. [*Diakses pada*: 1 7, 2019.] <https://www.businessinsider.com/leaked-stratfor-emails-us-government-sent-blackwater-veteran-to-fight-with-rebels-in-libya-and-syria-2012-3/?IR=T>.
- Kennedy, Elizabeth A. and Jordans, Frank. 2011. UN: Syria now in a civil war. www.nbcnews.com. [Online] 12 1, 2011. [*Diakses pada*: 1 9, 2019.] http://www.nbcnews.com/id/45514855/ns/world_news-mideast_n_africa/t/un-syria-now-civil-war/.
- Khalaf, Roula and Smith, Abigail Fielding. 2013. Qatar bankrolls Syrian revolt with cash and arms. ig-legacy.ft.com. [Online] 5 16, 2013. [*Diakses pada*: 1 9, 2019.] <http://ig-legacy.ft.com/content/86e3f28e-be3a-11e2-bb35-00144feab7de>.

- Kinzer, Stephen. 2016. The media are misleading the public on Syria. www.bostonglobe.com. [Online] februari 18, 2016. [Diakses pada: 19, 2019.] <https://www.bostonglobe.com/opinion/2016/02/18/the-media-are-misleading-public-syria/8YB75otYirPzUCnlwaVtcK/story.html>.
- Madhani, Aamer, Michaels, Jim and Brook, Tom Vanden. 2013. Source: Obama approves arming Syrian rebels. <https://www.usatoday.com>. [Online] 13 6, 2013. [Diakses pada: 15, 2019.] <https://www.usatoday.com/story/news/politics/2013/06/13/us-confirms-chemical-weapons-syria/2420763/>.
- Maydayrescue. 2015. www.maydayrescue.org. [Online] 8 26, 2015. [Diakses pada: 15, 2019.] <http://www.maydayrescue.org:80/content/james-le-mesurier-0>.
- Mazzetti, Mark, Goldman, Adam and Schmidt, Michael S. 2017. Behind the Sudden Death of a \$1 Billion Secret C.I.A. War in Syria. www.nytimes.com. [Online] 8 2, 2017. [Diakses pada: 19, 2019.] <https://www.nytimes.com/2017/08/02/world/middleeast/cia-syria-rebel-arm-train-trump.html>.
- McElroy, Damien. 2013. Syrian regime deploys deadly new weapons on rebels. www.telegraph.co.uk. [Online] 8 31, 2013. [Diakses pada: 15, 2019.] <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9512719/Syrian-regime-deploys-deadly-new-weapons-on-rebels.html>.
- Memcott, Mark. 2013. As Talks Continue, CIA Gets Some Weapons To Syrian Rebels. www.npr.org. [Online] 10 13, 2013. [Diakses pada: 15, 2019.] <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2013/09/13/222020019/as-talks-continue-cia-gets-some-weapons-to-syrian-rebels>.
- Merriam Webster. hostile. Merriam Webster. [Online] <https://www.merriam-webster.com/dictionary/hostile>.

NBC. 2011. 'Days of rage' protest urged in Syria; Egypt protests put pressure on others Middle East countries. www.nbcnews.com. [Online] 3 2, 2011. [Diakses pada: 1 7, 2019.] http://www.nbcnews.com/id/41400687/ns/world_news-mideast_n_africa/t/day-rage-protest-urged-syria/.

Nichols, Michelle. 2017. U.S. priority on Syria no longer focused on 'getting Assad out': Haley. www.reuters.com. [Online] 3 31, 2017. [Diakses pada: 1 5, 2019.] <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-usa-haley-idUSKBN1712QL>.

Reuters. 2013. Insight: Battered by war, Syrian army creates its own replacement. www.reuters.com. [Online] 4 21, 2013. [Diakses pada: 1 6, 2019.] <https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-paramilitary-insight/insight-battered-by-war-syrian-army-creates-its-own-replacement-idUSBRE93K02R20130421>.

-----, 2016. Islamic State militants plant mines and bombs in Palmyra: monitoring group. <https://www.reuters.com>. [Online] 6 21, 2016. <https://www.reuters.com/article/us-spain-child-rescue/spanish-miners-start-risky-tunneling-to-reach-missing-boy-idUSKCN1PI2QV?feedType=RSS&feedName=topNews>.

Russian Today. 2016. State Dept dismisses question from RT, says won't treat it like other media. www.rt.com. [Online] november 16, 2016. [Diakses pada: 1 7, 2019.] <https://www.rt.com/news/367192-kirby-rt-syria-accusations/>.

Salih, Yassin al-Haj. 2014. The Syrian Shabiha and Their State - Statehood & Participation. Heinrich-Böll-Stiftung. [Online] 3 3, 2014. <http://lb.boell.org/en/2014/03/03/syrian-shabiha-and-their-state-statehood-participation>.

- Sanchez, Raf. 2013. First Syria rebels armed and trained by CIA 'on way to battlefield' . The Telegraph. [Online] 9 3, 2013. <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10283758/First-Syria-rebels-armed-and-trained-by-CIA-on-way-to-battlefield.html>.
- Sanders, Gregory. 2008. DIIG Current Issues No. 1: Cost-Plus Contracts. www.csis.org. [Online] 10 16, 2008.
- Shaheen, Kareem. 2016. Aleppo hospital bombed again as Assad vows to 'clean' city. www.theguardian.com. [Online] 10 14, 2016. [*Diakses pada:* 1 7, 2019.] <https://www.theguardian.com/world/2016/oct/14/syrian-regime-bombs-hospital-again-assad-vows-clean-aleppo>.
- Sky News. 2012. Syria Rebels 'Aided By British Intelligence'. uk.news.yahoo.com. [Online] 8 19, 2012. [*Diakses pada:* 1 6, 2019.] <https://uk.news.yahoo.com/syria-rebels-aided-british-intelligence-041638306.html>.
- Solomon, Jay and Malas, Nour. 2012. U.S. Bolsters Ties to Fighters in Syria. www.wsj.com. [Online] 6 13, 2012. [*Diakses pada:* 1 10, 2019.] <https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303410404577464763551149048>.
- Taliano, Mark. 2018. Who Are the White Helmets? Fake News and Staged Rescues. www.globalresearch.ca. [Online] 12 26, 2018. [*Diakses pada:* 1 7, 2019.] <https://www.globalresearch.ca/video-who-are-the-white-helmets-fake-news-and-staged-rescues/5663906>.
- The Economist. 2012. Bashar bashed. <https://www.economist.com>. [Online] 12 1, 2012. [*Diakses pada:* 1 5, 2019.] <https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2012/12/01/bashar-bashed>.
- The Guardian. 2013. Russian military presence in Syria poses challenge to US-led intervention . <https://www.theguardian.com>. [Online] 12 23, 2013. [*Diakses*

pada: 1 5, 2019.] <https://www.theguardian.com/world/2012/dec/23/syria-crisis-russian-military-presence>.

Troy, Thomas F. 1993. TRUMAN ON CIA. www.cia.gov. [Online] 9 22, 1993. [*Diakses pada*: 1 10, 2019.] https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol20no1/html/v20i1a02p_0001.htm.

Tuysuz, Gul, Razeq, Raja and Walsh, Nick Paton. 2013. Al Qaeda-linked group strengthens hold in northern Syria. <http://edition.cnn.com>. [Online] 11 6, 2013. [*Diakses pada*: 1 10, 2019.] <http://edition.cnn.com/2013/11/05/world/europe/syria-turkey-al-qaeda/>.

U.S. Army Special Forces Command. 2013. U.S. Army Special Forces Command (Airborne) History. www.soc.mil. [Online] 5 28, 2013. [*Diakses pada*: 1 8, 2019.] [http://www.soc.mil/USASFC/USASFC History.html](http://www.soc.mil/USASFC/USASFC%20History.html).

Weiss, Gus W. 2007. The Farewell Dossier. www.cia.gov. [Online] 4 14, 2007. [*Diakses pada*: 1 11, 2019.] <https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/96unclass/farewell.htm>.